



KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI

PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Kajian Investasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera
Skema Riset : Kerja Sama Penelitian Swakelola
Koordinator Peneliti :
a. Nama : Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA
b. NIP/NIDN : 196412311994121001/0031126459
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Akuntansi
e. Nomor HP : +6281351533007
f. Anggota Peneliti :

No	Nama	NIP/NIDN	Program Studi	Bidang Keahlian
1	Dr. M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si	197005181997021001	Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ahli Ekonomi Wilayah
2	Dr. Rahma Yuliani, SE, M.Si	197707032003122012	Akuntansi	Akuntansi
3	Doni Stiadi, S.Si, M.Si	197607132006041001	Manajemen	Manajemen
4	Mellani Yulastina, SE., M.Ak., Ak., CA	198808012022032000	Akuntansi	Administrasi/ Operator

Anggaran : Rp.75.000.000,00

Sumber Anggaran : Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2022

Banjarmasin, 01 Desember 2022

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Koordinator Peneliti,

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA
NIP. 196412311994121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga Tim Peneliti dapat menyusun Laporan Kajian Investasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera Kabupaten Balangan tahun 2022. Terwujudnya kegiatan kajian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terutama Bappedalitbang Kabupaten Balangan, demikian pula halnya dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, serta Instansi terkait di Kabupaten Balangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, selayaknyalah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan, Bapak Kepala Bappedalitbang, Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Balangan beserta seluruh jajarannya, Direktur PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera beserta jajarannya, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kajian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua LPPM ULM yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan kajian ini. Semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menaruh harapan besar agar kiranya kajian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera terutama dalam berkontribusi secara nyata dalam pengembangan UMKM demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini, terima kasih.

Banjarmasin, Desember 2022

Tim Peneliti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Balangan yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu 1) Halong, 2) Juai, 3) Tebing Tinggi, 4) Batu Mandi, 5) Awayan, 6) Lampihong, 7) Paringin, dan 8) Paringin Selatan merupakan salah daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut berupa hasil-hasil pertanian, potensi wisata, dan pertambangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan salah satu misinya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya usaha kuliner. Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Balangan tersebut, menjadi sangat strategis untuk mengoptimalkan potensi yang ada dengan mengembangkan dukungan lembaga keuangan berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai media perantara yang menghimpun dana untuk dimanfaatkan oleh Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang begitu banyak di Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal, sehingga dapat berperan secara aktif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Balangan telah memiliki wadah yang cukup strategis berupa lembaga keuangan dalam bentuk Perseroan Kabupaten Balangan yang didirikan pada Tanggal 2 Juli 2012 yang berubah nama menjadi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera melalui Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031219.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera yang bertugas untuk a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan dan bentuk lainnya, b) memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, c) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, d) menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito atau jenis tabungan lain. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah a) Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, b) Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha, c) Mempercepat pembangunan di desa, d) menyediakan layanan perbankan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan merencanakan untuk memperkuat PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dengan meningkatkan penyertaan modal untuk memberikan kredit dengan bunga 0% kepada UMKM. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengenai kelayakan tambahan penyertaan modal tersebut. Aspek yang dikaji adalah aspek non keuangan seperti aspek kelembagaan dan hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial dan ekonomi, serta aspek keuangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki potensi UMKM yang cukup banyak untuk dikembangkan, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 11.030 dengan kategori skala usaha mikro yang sebagian besar

bergerak di bidang perdagangan eceran dan usaha kuliner (makanan dan minuman). Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan memberikan kemampuan permodalan yang memadai. Pembinaan dan pengembangan UMKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usahanya dari skala mikro menjadi kecil dan menengah. Selanjutnya penguatan UMKM diharapkan dapat memperkecil pengangguran dan kemiskinan karena menjadi solusi penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebanyak Rp10.000.000.000,- pada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera layak untuk dilakukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Ruang Lingkup Kajian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pembangunan Nasional	6
2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan, BPR	8
2.3. Kategori UMKM	10
2.4. Analisis SWOT.....	10
2.5. Investasi	13
2.6. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis	14
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Desain dan Kerangka Kajian	25
3.1.1. Desain Kajian.....	25
3.1.2. Kerangka Kajian	25
3.1.3. Lokasi Kajian	26
3.1.4. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data	27
3.2. Teknik Analisis Data	27

3.2.1. Analisis Non Keuangan	27
3.2.2. Analisis Keuangan	29
3.3. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian.....	31
BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Gambaran Umum Keadaan Wilayah	32
4.2. Gambaran Umum Makro Ekonomi Daerah.....	34
4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	34
4.2.2. Struktur Ekonomi	37
4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi	38
4.2.4. Pendapatan Perkapita	40
4.2.5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan	41
4.2.6. Pengangguran dan Kemiskinan	43
4.3.3. Aspek Penyertaan Modal.....	65
4.3.3.1. Jenis Penyertaan Modal	66
4.3.3.2. Posisi Modal dan Skema Penyertaan Modal.....	66
4.3.4.2. Produk dan Jenis layanan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	72
4.3.4.3. Persaingan Usaha.....	74
4.3.4.4. Peluang/Potensi Pasar PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera	77
4.4. Analisis Keuangan	83
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Rekomendasi	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks SWOT.....	12
Tabel 2. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Balangan tahun 2021	32
Tabel 3. Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan	34
Tabel 4. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Balangan 2018-2021.....	35
Tabel 5. PDRB Kabupaten Balangan 2018-2021.....	36
Tabel 6. Share Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2018-2021	37
Tabel 7. Kontribusi (%) Sektoral PDRB Kabupaten Balangan 2018-2021 ...	37
Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan	39
Tabel 9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Balangan 2018-2021	40
Tabel 10. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan	42
Tabel 11. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	42
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan	43
Tabel 13. Faktor Internal dan Eksternal	46
Tabel 14. Pembobotan SWOT	47
Tabel 15. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah.....	56
Tabel 16. Produk dan Aset Keuangan PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera .	71
Tabel 17. Jumlah UMKM di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020	79
Tabel 18. Distribusi dan Klasifikasi UMKM di Kabupaten Balangan Tahun 2020	80
Tabel 19. Jenis UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2020	80
Tabel 20. Rencana Penyaluran Kredit dan Penempatan Lainnya.....	83
Tabel 21. Realisasi Cash Flow dan Laba.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 22. Proyeksi Cash Flow dan Laba.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 23. Net Present Value (NPV)	85
Tabel 24. Net Benefit Cost Ratio (BCR) Karet	85
Tabel 25. Internal Rate of Return (IRR) Karet.....	86
Tabel 26. Discounted Payback Period Karet.....	87
Tabel 27. Analisis Rasio Keuangan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi BPR	26
Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan	33
Gambar 3. Peta Kekuatan Organisasi	51
Gambar 4. Skema Penyertaan Modal Pemda Kab. Balangan	69
Gambar 5. Grafik jumlah penduduk dan persentase Kabupaten Balangan pada setiap Kecamatan	78

DAFTAR LAMPIRAN

No table of figures entries found.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Balangan secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi geografis Kabupaten Balangan berada di lokasi yang dekat dengan calon ibukota negara, adalah potensi strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Kabupaten Balangan memiliki 8 Kecamatan 154 desa dan 3 kelurahan dengan luas 1.828,1225 km² dan jumlah penduduk 130.355 jiwa (BPS, Tahun 2021). Peningkatan roda pembangunan telah berjalan dan dapat dikatakan sukses dengan terciptanya iklim usaha yang baik. Perkembangan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh penanaman modal yang telah dilakukan berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penanaman modal merupakan instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam pelaksanaan penanaman modal dibutuhkan pengendalian dan pengawasan, agar pelaksanaannya dapat terwujud dan dilaksanakan diperlukan kepatuhan para investor terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal yang meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi bukan sekedar setor modal, kemudian menunggu hasilnya, namun perlu dilakukan perencanaan yang matang melalui analisis

kelayakan investasi untuk mengetahui prospek dari investasi yang mendasari keputusan investasi tersebut menguntungkan atau tidak.

Lembaga perbankan merupakan salah satu variabel kunci sebagai lembaga perantara atau intermediasor untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu lembaga perbankan yang identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah, karena itu lebih banyak ditemui di kabupaten hingga pelosok kecamatan.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat adalah a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan dan bentuk lainnya, b) memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, c) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, d) menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito atau jenis tabungan lain. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah a) Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, b) Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha, c) Mempercepat pembangunan di desa, d) menyediakan layanan perbankan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat pada Tanggal 2 Juli 2012 yang berubah nama menjadi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera melalui Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031219.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera. Perubahan tersebut diharapkan agar lebih berkembang secara profesional sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu memberikan tambahan penyertaan modal untuk meningkatkan kapabilitas kemampuan bank tersebut. Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 23 ayat 1 bahwa penyertaan modal dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk a) pengembangan usaha,

b) penguatan struktur permodalan, dan c) penugasan pemerintah daerah. Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD tersebut.

Pemerintah Kabupaten Balangan hingga saat ini memberikan penyertaan modal pada beberapa BUMD miliknya diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Kalsel, PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera, PDAM, dan PT. Asabaru Daya Cipta Lestari. Sehubungan dengan penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera, sampai saat ini jumlahnya mencapai Rp 23.500.000.000,-. Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan untuk melakukan penambahan penyertaan modal dengan tujuan untuk a) Memperkuat permodalan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam rangka pengembangan usaha, dan b) Melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Balangan terkait kredit bunga 0 % bagi UMKM Kabupaten Balangan.

Kredit bunga 0 % yang direncanakan, merupakan kontribusi nyata Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah melalui pemberian kredit kepada UMKM, sehingga diharapkan UMKM tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah daerah tentu mengharapkan adanya *multiplier effect* (efek pengganda), karena dengan memberikan kredit dengan bunga 0 % menjadi pemicu UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga aktivitas ekonomi masyarakat meningkat dan tentunya penghasilan juga meningkat, daya beli meningkat dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan Pendapatan Asli Daerah, PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera menyumbangkan laba pada pendapatan daerah Kabupaten Balangan yakni di tahun 2020 sebesar Rp. 380.038.979,-.

1.2. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebagai pemilik saham utama PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera merencanakan penambahan dana untuk memperkuat BPR tersebut dalam meningkatkan kapabilitasnya kemampuan sebagai bank yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Realisasi dari rencana dimaksud diarahkan pada pemberian kredit dengan bunga 0% kepada UMKM di Kabupaten Balangan dengan harapan dapat memperkuat permodalannya untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Kajian ini dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi internal dan eksternal PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana kinerja PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera berdasarkan aspek keuangan?
3. Apakah tambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Balangan layak diberikan kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Kajian Investasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera adalah mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera untuk meningkatkan PAD Kabupaten Balangan, sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun sasaran dari penyusunan kajian investasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kondisi kemampuan/kesehatan/tingkat efisiensi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

- c. Melakukan analisis kelayakan investasi/finansial terhadap rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan untuk pengembangan usaha PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera dan rencana program kredit bunga 0%.

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Secara garis besar kajian investasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Identifikasi kondisi kemampuan/kesehatan perbankan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
- b. Identifikasi rencana pengembangan usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
- c. Identifikasi rencana program pemberian kredit bunga 0%.
- d. Identifikasi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Balangan dalam melakukan penyertaan modal.
- e. Identifikasi kelayakan investasi/finansial penyertaan modal untuk pengembangan usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.

Sehubungan dengan kelayakan investasi, beberapa hal teknis yang perlu untuk dikaji secara lebih mendalam baik aspek non keuangan, maupun aspek keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek finansial (kondisi keuangan perusahaan).
- b. Aspek teknis dan produksi (jenis layanan, mekanisme dan prosedur layanan, biaya yang dikenakan setiap layanan, kendala dan masalah pemberian layanan).
- c. Aspek sosial (segmen/obyek penerima layanan, bentuk pemberian layanan, kepuasan pelanggan).
- d. Aspek hukum (legalitas, kesepakatan, hubungan industrial, perizinan, status perusahaan, hak dan kewajiban).
- e. Aspek organisasi (jumlah SDM, perumusan organisasi mulai dari tugas, tata kerja, dll).
- f. Aspek pemasaran (potensi penerimaan arus kas, rencana pemasaran).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Nasional

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation buildings*). Ginanjar Kertasasmita mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Pembangunan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. (Rustiadi, 2011). Pembangunan bertalian dengan konsep pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*national building*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan dan pembinaan. United Nations of Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choice*). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the 16 ultimate end*), bukan alat, cara, atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat dari formasi modal manusia (*human capital formation*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pembangunan nasional sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial yang lebih baik, atau yang lebih modern, jelas merupakan gejala sosial yang berdimensi banyak dan dapat

didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, pembangunan hukum, administrasi pembangunan dan sebagainya. Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian perubahan majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. Substansi permasalahan yang berbeda antara satu masalah dengan daerah lainnya dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor yang dimaksud. Adapun faktor-faktor pendukung program pembangunan daerah antara lain meliputi: a. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri b. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya c. Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan pendanaan d. Koordinasi yang baik e. Top down dan bottom up planning f. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus g. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan, BPR

Pengertian Bank Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta.

Jenis-jenis Bank Menurut (Kasmir, 2014) dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah 10 (sepuluh) operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya dalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan).

Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, jenis bank dilihat dari segi fungsinya menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 3). Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing. Fungsi dan Tugas adalah (1) Menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka; (2) Memberikan kredit; (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah; (4) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain.

2.3. Kategori UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa definisi yang berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga-lembaga bahkan undang-undang. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, kemudian pendapatan yang diterima oleh usaha mikro tidak boleh lebih dari Rp 300.000.000

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Range untuk pendapatan yang diterima oleh Usaha Kecil mulai dari Rp300.000.000 sampai Rp2,5 M.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sesuai peraturan undang-undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh usaha menengah mulai dari Rp2,5 M sampai Rp5 M.

2.4. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2013) Analisis SWOT adalah indifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT menurut Siagian (2018) merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila

digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT merupakan akronim untuk kata- kata *strenghts* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangang misi, tujuan, strategi dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaasn (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisi SWOT. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi (Istiqomah & Andriyanto, 2018). Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hasilnya yang cenderung subjektif dalam membuat setiap pernyataan harus realistis terutama untuk menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal, analisis harus didasari kondisi faktual atau yang sedang terjadi, dan menghindari hal yang tidak perlu untuk dianalisis lebih dalam untuk mencegah kerumitan analisis. Untuk faktor internal dapat menjadi *strenghts* dan *weakness* sedangkan untuk faktor eksternal berfokus pada *opportunities* dan *threats*.

Metode analisis SWOT berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan berbagai sisi pandangan sehingga membantu untuk melihat sisi yang tidak terlihat. Hasil analisis SWOT berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman dimasa mendatang. Matriks SWOT dapat digunakan untuk menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan, dan

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT (Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman) merupakan alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO (*strengths-opportunities*), WO (*weakness-opportunities*), ST (*strengths-threats*), dan WT (*weaknesses-threats*) (Ariyana et al., 2020; Malihah et al., 2021)

Tabel 1. Matriks SWOT

	<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
<i>Threats</i>	S-T Memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman	W-T Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman
<i>Opportunities</i>	S-O Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang	W-O Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang

- a. Strategi S-O = Kuadran 1 Ini merupakan situasi yang sangat paling menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi).
- b. Strategi S-T = Kuadran 2 Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ini dipakai untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
- c. Strategi W-O = Kuadran 3 Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Cara yang efektif adalah dengan peninjauan 37 kembali teknologi yang dipergunakan untuk atau dengan menawarkan produkproduk baru.
- d. Strategi W-T = Kuadran 4 Strategi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana perusahaan harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Kegiatan ini bersifat defensif dan

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2.5. Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi terlibat dalam berbagai bidang ekonomi, seperti manajemen bisnis dan keuangan baik untuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Investasi dalam bahasa undang-undang sering disebut dengan penanaman modal.

Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable. Terminologi investasi pada berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, investasi dapat berarti investasi yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic direct investor, DDI*), investor asing (*Foreign direct investment, FDI*), dan investasi yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*). Investasi yang dilakukan secara tidak langsung ini dikenal dengan istilah investasi dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*capital market*).

Investasi mempunyai pengertian yang sangat luas, terutama bila dikaitkan dengan kegiatan pasar modal sekarang. Setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan termasuk investasi, tetapi dalam kebiasaan umum, pembicaraan investasi dikaitkan dengan sistem produksi atau dengan kata lain peningkatan aset. Membahas tentang investasi berarti membahas tentang pemanfaatan sejumlah aset yang dimiliki untuk pencapaian suatu tujuan di masa yang datang. Berikut ini dijelaskan mengenai beberapa pendapat ahli mengenai investasi.

Investasi adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan

perolehan modal. Investasi dapat menunjukkan ke suatu investasi keuangan (dimana investor menetapkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan keberhasilan pekerjaannya. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (*capital stocks*) terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan. Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal ini, sedangkan Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Menurut Halim investasi terbagi menjadi dua yaitu: investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) dan investasi pada aset-aset riil (*real assets*). Investasi aset-aset finansial dilakukan di pasar uang ementara investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset portofolio, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan lainnya.

2.6. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis

2.6.1. Aspek Non Keuangan

1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling memengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar (Kasmir & Jakfar, 2020). (Sucipto, 2011) menyatakan kajian yang dilakukan dalam aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk menguji serta menilai sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang direncanakan antara lain:

a. Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau *marketing mix* yang berbeda pula. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat pasar terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal, misalnya keinginan, kebutuhan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian dan praktik-praktik pembeliannya.

b. Menentukan Posisi Pasar

Menentukan posisi pasar adalah menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut.

c. Menetapkan Pasar Sasaran

Melakukan analisis untuk memutuskan berapa segmen pasar yang akan dicakup, lalu memilih segmen mana yang akan dilayani yang dianggap paling potensial. Secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen.

d. Pesaing Pasar

Studi pasar akan memberikan gambaran mengenai intensitas persaingan, informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, pendapatan rata-rata calon konsumen, ketersediaan saluran distribusi, dan kondisi sarana angkutan

2. Aspek Teknis

Melakukan analisis teknik atau operasional dan teknologi. Artinya, apakah dari segi pembangunan proyek dan segi implementasi operasional bisnis secara teknis dapat dilaksanakan, demikian juga dengan aspek teknologi yang digunakan. Penilaian terhadap aspek ini penting dilaksanakan sebelum bisnis dijalankan, karena akan sangat terkait dengan teknik/operasional.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan analisis dalam aspek ini diantaranya adalah penentuan lokasi, penentuan luas produksi, penentuan tata letak (*lay out*), penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi:

- 1) Penentuan lokasi usaha sangat penting karena apabila salah dalam menentukan lokasi usaha yang dipilih akan mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya yang harus dikeluarkan.
- 2) Penentuan luas produksi adalah kuantitas unit produksi yang seharusnya dihasilkan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai optimalisasi profit.
- 3) Penentuan Tata Letak (*Lay Out*), tujuan penentuan *layout* adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi optimal.
- 4) Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi baik untuk barang atau jasa hendaknya disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang.

3. Aspek Manajemen

(Kasmir & Jakfar, 2020) menyatakan aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. (Sucipto, 2011) menyatakan kajian aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau tidak. Untuk melakukan kajian terhadap aspek sumber daya manusia ada beberapa elemen yang harus dikaji, di antaranya adalah *job analis* (analisis pekerjaan) perencanaan, rekrutmen, dari pemutusan hubungan kerja

4. Aspek Ekonomi dan Sosial

Bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu

ditelaah apakah usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian (Kasmir & Jakfar, 2020)

5. Aspek Hukum

Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian, dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sempurna pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Jenis badan hukum yang dimaksudkan disini yaitu badan hukum perseorangan yang hanya dimiliki oleh perseorangan (hanya seorang). Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus seperti badan hukum lainnya. Kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan (Kasmir & Jakfar, 2020).

6. Aspek Penyertaan Modal

Menurut Lusiana (2012), pada dasarnya kegiatan penanaman modal diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu:

- a. Investasi Langsung (*direct Investment*) atau penanaman modal jangka panjang
Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun memberikan lisensi dan lain-lain. Investasi langsung pada dasarnya investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis), investasi jenis ini lebih terkenal sebagai investasi sektor riil, misalnya

perkebunan, peternakan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap masyarakat luas.

- b. Investasi tidak Langsung (*Indirect Investment*) atau penanaman modal tidak langsung (*Portfolio investment*) Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan / atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Investasi tidak langsung adalah investasi pada asset keuangan (*financial asset*) seperti deposito, surat berharga seperti pada saham dan obligasi, *commercial paper*, reksadana dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 7, bahwa penyertaan modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Pendapatan masyarakat; dan
- 4). Penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah seyogianya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (good corporate governance). Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Tim Penasihat Investasi Pemkab berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent) agar penyertaan modal tersebut berjalan efektif, efisien dan produktif

2.6.2. Aspek Keuangan

Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha) dan sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal (uang), di samping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya pra investasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Untuk memenuhi kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada (Kasmir & Jakfar, 2020).

Sumber dana yang dicari dapat dipilih, apakah dengan cara menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman (modal asing). Penggunaan masing-masing modal tergantung dengan tujuan penggunaan modal, jangka waktu serta jumlah yang diinginkan perusahaan. Masing-masing modal memiliki keuntungan dan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari segi biaya, waktu, persyaratan untuk memperolehnya, dan jumlah yang dapat dipenuhi.

Masalah yang perlu memperoleh perhatian berkaitan dengan perolehan modal adalah masa pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pengembalian ini tergantung dari perjanjian dan estimasi keuntungan yang diperoleh dari masa-masa mendatang.

Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha. Perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum usaha dijalankan. Semua itu tentunya menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang akhirnya akan dituangkan dalam aliran kas (*cash flow*) perusahaan selama periode usaha. Dengan dibuatnya aliran kas

perusahaan, kemudian dinilai kelayakan investasi tersebut melalui kriteria kelayakan investasi.

Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak atau tidak dijalankan dilihat dari aspek keuangan. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan *Payback Period (PP)*, *Average Rate of Return (ARR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Profitability Index (PI)*. Dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Kasmir and Jakfar (2020) menjelaskan secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti:

1) Sumber dana

Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau modal gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi dua macam, yaitu:

a) Modal Asing (Modal Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta bunga yang besarnya relatif. Kemudian adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian sebelumnya.

b) Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik

perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai sesuatu usaha adalah tidak adanya beban bunga seperti modal pinjaman.

2) Biaya kebutuhan investasi

Kasmir and Jakfar (2020) menjelaskan komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar biaya kebutuhan investasi meliputi:

- a. Biaya pra investasi, terdiri dari:
 1. Biaya pembuatan studi
 2. Biaya pengurusan izin-izin
- b. Biaya pembelian aktiva tetap, antara lain:
 1. Tanah
 2. Mesin-mesin
 3. Bangunan
- c. Biaya pembelian aktiva tetap, antara lain:
 1. Tanah
 2. Mesin-mesin
 3. Bangunan
 4. Peralatan
- d. Biaya operasional, terdiri dari:
 1. Upah dan gaji tenaga kerja
 2. Biaya listrik dan air
 3. Biaya pemeliharaan
 4. Pajak
 5. Biaya-biaya lainnya.

3) Arus kas (*Cash Flow*)

Kasmir and Jakfar (2020) menerangkan arus kas (*cash flow*) merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. *Cash flow* menggambar beberapa uang yang masuk ke

perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. *Cash flow* juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Jadi, arus kas adalah jumlah uang kas yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi yang dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Jenis-jenis *cash flow* yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari:

- a) *Initial cash flow* atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi.
 - b) Operasional *cash flow* merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha.
 - c) Terminal *cash flow* merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir.
- 4) Kriteria penilaian investasi

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan perlu dilakukan dapat diukur dengan beberapa kriteria. Setiap penilaian layak diberikan nilai yang standart untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan dengan rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. Kasmir and Jakfar (2020) menyatakan adapun kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi adalah:

- a) *Payback Period* (PP)

Metode *Payback Period* (PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu usaha dengan cara mengukur seberapa cepat suatu investasi kembali. Dasar yang dipergunakan dalam perhitungan adalah aliran kas bersih (*proceed*) yang diperoleh setiap tahun bukan laba setelah pajak. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan (dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri).

$$\text{Payback Period (PP)} = \frac{\text{Nilai Investasi}}{\text{Kas Masuk Bersih}} \times 1 \text{ tahun}$$

Kriteria penilaian untuk *Payback Period*:

- a. Jika $PP < \text{waktu maximum } \textit{payback period}$ nya, maka usulan investasi diterima.
- b. Jika $PP > \text{waktu maximum } \textit{payback period}$ nya, maka usulan investasi ditolak.

b) *Net Present Value (NPV)*

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih (*PV of Proceed*) dan PV investasi (*capital outlays*) selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan *net present value (NPV)*.

$$NPV = \text{Total PV Aliran Kas Bersih} - \text{Total PV Investasi}$$

Kriteria penilaian NPV adalah:

- a. Jika $NPV > 0$, maka investasi diterima.
- b. Jika $NPV < 0$, maka investasi ditolak.

c) *Internal Rate of Return (IRR)*

Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR.

$$IRR = i_1 + \frac{NPV^1}{NPV^1 - NPV^2} (i_2 - i_1)$$

Dimana:

i_1 tingkatbunga 1 (*tingkat discount rate yang menghasilkan*
= NPV^1).

i_2 tingkat bunga 2 (*tingkat discount rate yang menghasilkan*
= NPV^2).

$$IRR = P1 - C1 \times P2 - P1$$

Dimana:

P1 = tingkat bunga 1

P2 = tingkat bunga 2 C1 =

NPV 1

C2 = NPV 2

Kriteri penilaian IRR:

Jika IRR > dari bunga pinjaman, maka investasi diterima.

Jika IRR < dari bunga pinjaman, maka investasi ditolak.

d) *Profitability Index (PI)*

Profitability Index (PI) atau *benefit and cost ratio (B/C Ratio)* merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi

$$PI = \frac{\sum PV \text{ Kas Bersih}}{\sum PV \text{ Invetasi}} \times 100\%$$

Kriteria untuk Profitabilitas Indeks:

a. Jika $PI > 1$, maka investasi diterima.

b. Jika $PI < 1$, maka investasi ditolak.

e) *Payback Period*

Payback Period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula.

f) *Discounted Payback Period*

Discounted Payback Period hampir sama dengan *payback period*. Metode *discounted payback period* dihitung dengan menjadikan seluruh kas yang diterima perlu dikonversi terlebih dahulu ke nilai sekarang atau *present value*.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain dan Kerangka Kajian

3.1.1. Desain Kajian

Kajian Investasi PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera Kabupaten Balangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karakteristik pendekatan kualitatif berdasarkan Cresswell (2007), yaitu natural setting, researcher as key instrumen, multiple sources of data, inductive data analysis, participants, emergent design, theoretical lens, interpretive inquiry, holistic account. Setiap rancangan penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri tergantung pada 3 (tiga) kondisi, yaitu: tipe dari pertanyaan penelitian, kontrol dari investigator atas perilaku kejadian, fokus pada isu kontemporer sebagai sejarah fenomena (Yin, 2003, 2011)

Menurut Yin (2003, 2011) studi kasus merupakan salah satu dari rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu aktivitas, proses atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus cocok untuk kajian ini yang menganalisis sebuah program, peristiwa, aktivitas dan proses terkait

3.1.2. Kerangka Kajian

Kajian Investasi BPR di Kabupaten Balangan sangat penting untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Balangan telah memiliki wadah yang cukup strategis dalam bentuk perseroan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera. Pendirian PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera tersebut sesuai

dengan visi dan misi Pemda Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Kerangka pikir kajian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi BPR

3.1.3. Lokasi Kajian

Lokasi kegiatan penyusunan kajian analisis intestasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera adalah di Kabupaten Balangan.

3.1.4. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer berupa masukan dari pihak terkait sehubungan dengan kajian investasi terhadap PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dengan melibatkan stakeholder terkait Pemerintah Daerah termasuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Perwakilan UMKM, dan Masyarakat. Data primer juga diperoleh melalui dari masyarakat dan UMKM yang menjadi konsumen akhir dari BPR. Metode pengumpulan data dilakukan dengan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan survey lapangan dengan beberapa pelaku usaha UMKM.

b. Data sekunder

Laporan Keuangan (Laba Rugi, Arus Kas, Neraca, Lengkap) 5 Tahun terakhir, Data UMKM, Nilai Investasi yang didapat oleh BPR, Data Nasabah BPR, Profil Nasabah BPR 5 tahun terakhir, Renstra Pemda Balangan, Rensta BPR, dan SOP Pemberian Kredit.

3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif/non keuangan dan kuantitatif/keuangan. Pendekatan tersebut digunakan dalam menjawab tujuan kajian, sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

3.2.1. Analisis Non Keuangan

Analisis kualitatif/non keuangan menggunakan analisis SWOT dan analisis beberapa aspek sebagai berikut:

a. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats)

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis dalam rangka

merumuskan strategi perusahaan. Berdasarkan asumsi strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber data internal perusahaan dan situasi eksternalnya. Rangkuti (2013) menjelaskan bahwa tahapan untuk mengetahui kuadran posisi perusahaan dimulai dari mengidentifikasi faktor-faktor internal dan situasi eksternal perusahaan. Sementara untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap rencana pengaktifan perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan digunakan analisis menggunakan matriks IFAS (*internal strategic factors analysis summary*) dan EFAS (*external strategic factors analysis summary*).

b. Aspek Hukum

Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di suatu wilayah.

c. Aspek Kelembagaan

Identifikasi potensi sumber daya manusia, analisis pengelolaan/ manajemen SDM BUMD, penetapan bentuk kelembagaan pengelola bidang usaha, pembentukan kelembagaan pengelola bidang usaha, kelengkapan kelembagaan, kelembagaan lain yang terkait dengan penyelenggaraan bidang usaha

d. Aspek Pasar dan Pemasaran

Identifikasi potensi pasar di dalam dan di luar daerah dalam rangka memperluas pangsa pasar. Dalam rangka memperluas pemasaran produk dilakukan dengan cara memasarkan produk secara *online* dan *offline*

e. Aspek Penyertaan Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 7, bahwa penyertaan modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan

perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Pendapatan masyarakat; dan
- 4). Penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah seyogianya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*). Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Tim Penasihat Investasi Pemkab berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar penyertaan modal tersebut berjalan efektif, efisien dan produktif.

3.2.2. Analisis Keuangan

1. *Net Present Value (NPV)*

Net Present Value (NPV) yaitu merupakan nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi/ modal yang dikeluarkan. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

$NPV > 0$ (nol) → usaha/proyek layak (*feasible*) untuk dilaksanakan

$NPV < 0$ (nol) → usaha/proyek tidak layak (*unfeasible*) untuk dilaksanakan

$NPV = 0$ (nol) → usaha/proyek berada dalam keadaan BEP dimana $TR=TC$ dalam bentuk present value

2. **Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)**

Net B/CR yaitu merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang/present value (PV). Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah:

Jika $BCR > 1$, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai $BCR < 1$, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan.

3. **Internal Rate Return (IRR)**

IRR yaitu merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan nol. IRR tidak menunjukkan berapa banyak uang/ dana yang telah dihasilkan, tetapi bagaimana efisiensi waktu untuk dana yang telah diinvestasikan yaitu periode investasi yang menguntungkan dalam jangka pendek, semakin tinggi IRR. Kriteria yang digunakan pada metode ini adalah:

- a. Jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari discount factor (tingkat bunga bank), maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak untuk dilakukan.
- b. Jika sama dengan discount factor, dikatakan investasi yang ditanamkan akan balik modal.
- c. Sedangkan jika IRR lebih kecil dari discount factor maka investasi yang ditanamkan tidak layak. IRR merupakan tingkat suku bunga/biaya modal yang diperhitungkan mengembalikan nilai investasi selama umur proyek.

4. **Discounted Payback Period (DPP)**

DPP yaitu menunjukkan waktu yang diperlukan proyek untuk menghimpun dana internal guna mengembalikan jumlah dana yang telah diinvestasikan dalam proyek. Untuk mengetahui kelayakan suatu proyek berdasarkan payback period, maka angka atau nilai payback period proyek tersebut harus dibandingkan dengan payback period yang disyaratkan/diinginkan oleh investor atau dapat juga dibandingkan dengan payback period proyek sejenis yang sudah ada sebelumnya.

3.3. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kajian kelayakan bidang usaha ini sebagai berikut:

1. Persiapan pekerjaan yakni koordinasi dan konsolidasi tim, telaah dan sosialisasi KAK terhadap tim, penentuan metode dan jadwal kerja, kebutuhan data hingga penyusunan laporan pendahuluan untuk didiskusikan/diseminarkan.
2. Melakukan survei pengumpulan data primer dan sekunder (aspek ekonomi, sosial, budaya dan hukum).
3. Melakukan analisis sesuai dengan aspek kelayakan bidang usaha.
4. Melakukan analisis penyertaan modal.
5. Melakukan analisis kelembagaan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera
6. Merumuskan kelayakan bidang usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera
7. Menyusun laporan akhir.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Keadaan Wilayah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Paringin sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara astronomis Kabupaten Balangan terletak di antara $2^{\circ}1'37''$ sampai dengan $2^{\circ}35'58''$ Lintang Selatan dan di antara $114^{\circ}50'24''$ sampai dengan $115^{\circ}50'24''$ Bujur Timur, dengan posisi geografisnya berbatasan dengan:

1. Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah utara;
2. Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah timur;
3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah selatan; dan
4. Hulu Sungai Utara di sebelah barat.

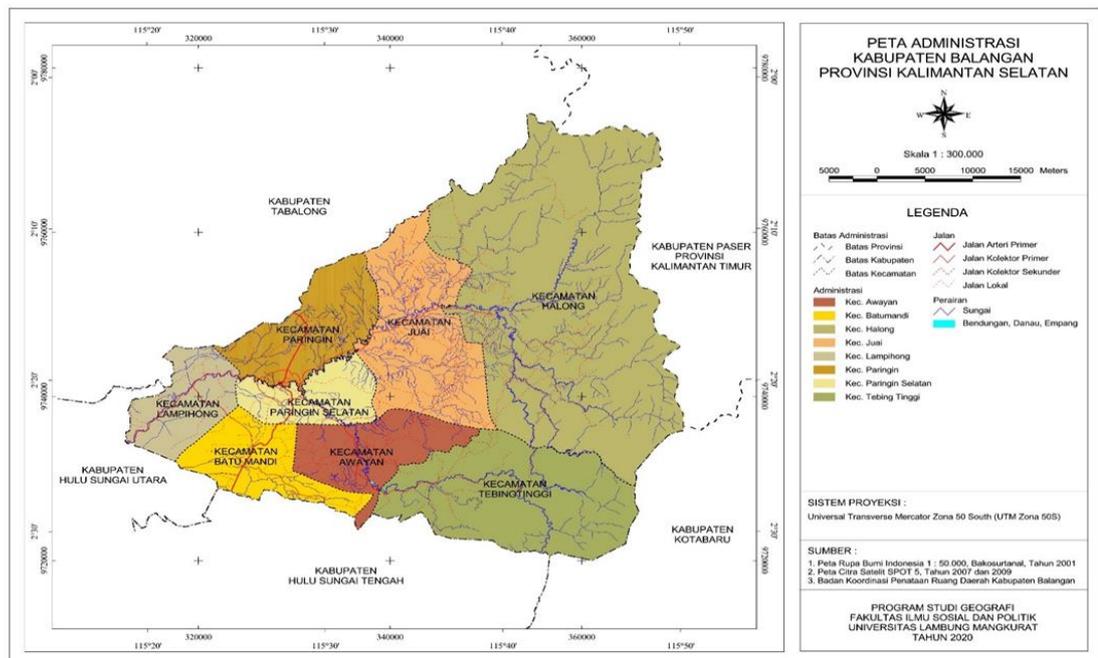
Luas wilayah Kabupaten Balangan mencapai 1.828,1225 km², terbesar berupa dataran dan pegunungan, dengan jumlah penduduk menurut hasil proyeksi pada tahun 2021 sebanyak 132.213 jiwa (66.821 laki-laki dan 65.392 perempuan) yang tersebar di 8 kecamatan dan 157 desa/kelurahan (154 desa dan 3 kelurahan). Kecamatan Halong memiliki luas wilayah terbesar, yakni 35,13 persen dari luas Kabupaten Balangan dengan jumlah penduduk terbanyak 20.608 jiwa, sedangkan luas wilayah terkecil dimiliki Kecamatan Paringin Selatan (4,62%) dengan jumlah penduduk 15.914 Jiwa. Hal ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Balangan Tahun 2021

Kecamatan	Desa (Jml)	Luas (KM ²)	%
1. Lambahong	27	96,96	5,16
2. Batumandi	18	147,96	7,88
3. Awayan	23	142,57	7,59
4. Tebing Tinggi	12	257,25	13,69
5. Paringi	16	100,04	5,33
6. Paringin Selatan	16	86,80	4,62
7. Juai	21	386,88	20,60
8. Halong	24	659,84	35,13
Kab. Balangan	157	1.828,1225	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2022

Peta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan

Kepadatan Penduduk Kabupaten Balangan, sebagaimana Tabel 3 telah meningkat dari 69,40 di tahun 2020 menjadi 72,32 di tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,90 persen. Selama 10 tahun terakhir (2010-2020) Penduduk tumbuh rata-rata 1,41 persen dengan pertumbuhan diatas rata-rata terjadi di Kecamatan Paringin Selatan (2,92%), Kecamatan Tebing Tinggi (1,69%) Kecamatan Batu Mandi (1,52%), Kecamatan Paringin (1,49%), dan Kecamatan Lambahong (1,52%).

Tabel 3. Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk		Pertumbuhan Penduduk		Kepadatan
	2020	2021	2010-2020	2020-2021	2021
1. Lampihong	18.282	18.541	1,42	1,89	197,22
2. Batumandi	18.831	19.108	1,52	1,97	129,14
3. Awayan	13.775	13.949	1,27	1,69	97,84
4. Tebing Tinggi	7.073	7.193	1,69	2,27	27,96
5. Paringi	19.701	19.994	1,49	1,99	199,86
6. Paringin Selatan	15.462	15.914	2,92	3,92	183,34
7. Juai	16.801	16.906	0,62	0,83	43,70
8. Halong	20.340	20.608	0,86	1,16	31,23
Kab. Balangan	130.355	132.213	1,41	1,90	72,32

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2022

Penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2021 sebanyak 132.213 jiwa tersebut, sebanyak 72,73 persen (96.151 jiwa) adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas atau digolongkan sebagai tenaga kerja, terdiri dari 72.475 Jiwa (75,37%) Angkatan kerja (97,60% bekerja dan 2,40% Pengangguran terbuka) dan 23.671 jiwa (24,63%) bukan Angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

4.2. Gambaran Umum Makro Ekonomi Daerah

4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur dengan tingkat produksi, yakni Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah (*value added*) bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah perekonomian. Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku seperti dalam Tabel 4, menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dinilai dengan harga yang berlaku pada periode tahun 2018-2021.

Tabel 4. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Balangan 2018-2021

Lapangan Usaha	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.250,01	1.326,25	1.311,57	1.406,44
B Pertambangan dan Penggalian	6.680,77	6.680,58	6.317,73	7.130,83
C Industri Pengolahan	207,48	213,25	212,25	231,37
D Pengadaan Listrik, Gas	3,89	4,14	4,42	4,68
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,99	28,20	30,15	30,50
F Konstruksi	477,80	500,03	501,84	525,05
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	590,46	641,00	640,39	671,41
H Transportasi dan Pergudangan	204,30	219,82	216,77	221,15
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,44	39,45	40,27	41,73
J Informasi dan Komunikasi	143,02	149,41	157,48	165,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi	35,31	39,09	40,66	40,79
L Real Estate	105,22	111,12	115,76	121,72
M, N Jasa Perusahaan	7,70	8,62	8,68	9,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	480,45	520,17	551,73	544,62
P Jasa Pendidikan	350,09	378,60	396,31	416,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,59	103,49	110,86	122,26
R, S, T, U, Jasa Lainnya	58,17	64,45	65,42	66,85
PDRB	1.0751,68	1.1027,66	1.0722,30	1.1750,38

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2022

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2021 mencapai 11,75 triliun rupiah. Nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 1,03 triliun rupiah, setelah sebelumnya mengalami penurunan 0,31 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 11,03 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha dan fluktuasi perubahan harga akibat terjadinya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2019.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB kabupaten Balangan juga mengalami kenaikan dari 9,18 triliun rupiah tahun 2020 menjadi 9,48 triliun rupiah di tahun 2021, setelah sebelumnya juga mengalami penurunan 0,23 triliun rupiah dibanding tahun 2019, akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19, dimana Penurunan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh

menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat pandemi Covid-19 dan tidak dipengaruhi perubahan harga.

Tabel 5. PDRB Kabupaten Balangan 2018-2021

Lapangan Usaha	Milyar Rp			
	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	970,79	1.010,08	991,90	1.027,02
B Pertambangan dan Penggalian	6.220,99	6.382,36	6.143,65	6.379,57
C Industri Pengolahan	141,59	144,75	140,77	146,76
D Pengadaan Listrik, Gas	2,34	2,45	2,55	2,65
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,63	20,05	21,27	21,38
F Konstruksi	332,34	340,00	339,68	342,18
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392,78	412,45	407,92	412,95
H Transportasi dan Pergudangan	141,49	148,58	145,31	147,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,45	27,35	27,28	27,64
J Informasi dan Komunikasi	110,35	114,59	122,32	128,69
K Jasa Keuangan dan Asuransi	23,88	25,78	26,94	25,86
L Real Estate	79,14	81,40	83,42	86,25
M, N Jasa Perusahaan	5,02	5,42	5,28	5,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308,07	328,66	340,48	331,63
P Jasa Pendidikan	244,42	255,91	265,57	271,28
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,83	68,28	72,28	78,70
R, S, T, U Jasa Lainnya	39,06	41,75	41,26	41,69
PDRB	9.121,16	9.409,83	9.177,87	9.477,29

Sumber; BPS Kabupaten Balangan 2019-2022

Membbaiknya perekonomian Kabupaten Balangan ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB di tahun 2021 yang melebihi nilai PDRB sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019, baik PDRB harga berlaku maupun PDRB harga konstan.

Jika dilihat lebih luas ke dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Tabel 6, angka PDRB Kabupaten Balangan tersebut pada tahun 2021 hanya meliputi 6,09 persen dari nilai PDRB yang diciptakan seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah Rp. 192.576.581,16 (dalam jutaan). Posisi

Kabupaten Balangan berada di urutan ke 7 dari 13 Kabupaten/kota yang ada. Ini menunjukkan bahwa skala ekonomi kabupaten Balangan termasuk sedang dibanding wilayah lain pada umumnya.

Kabupaten/Kota yang memiliki ukuran skala ekonomi paling besar (berada di urutan teratas) adalah Kota Banjarmasin adalah wajar, mengingat sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, memiliki wilayah yang strategis sebagai pintu gerbang arus distribusi dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel 6. Share Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2018-2021

Kabupaten/Kota	Share PDRB (%)				Rank
	2018	2019	2020	2021	
1. Tanah Laut	7,73	7,63	7,63	7,63	6
2. Kotabaru	13,35	13,23	13,27	13,32	2
3. Banjar	9,09	9,12	9,15	9,10	5
4. Barito Kuala	4,70	4,77	4,82	4,75	9
5. Tapin	4,67	4,63	4,65	4,68	10
6. Hulu Sungai Selatan	3,59	3,60	3,63	3,63	12
7. Hulu Sungai Tengah	3,84	3,86	3,91	3,82	11
8. Hulu Sungai Utara	2,67	2,71	2,75	2,72	13
9. Tabalong	10,11	9,97	9,83	9,98	4
10. Tanah Bumbu	11,13	10,99	11,02	11,22	3
11. Balangan	6,28	6,05	5,94	6,09	7
12. Kota Banjarmasin	17,74	18,11	18,12	17,88	1
13. Kota Banjarbaru	5,10	5,32	5,28	5,17	8
Kalimantan Selatan (Rp,Juta)	100,00	100,00	100,00	100,00	
	171.684.055,90	180.557.639,22	179.094.106,63	192.576.581,16	

Sumber: BPS Kalsel, 2022

4.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur PDRB yang digambarkan dari share atau kontribusi sektoral lapangan usaha dalam menciptakan produksi dapat menjadi gambaran tingkat kemajuan ekonomi sekaligus sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Selama periode 2018-2021 sebagaimana Tabel 7, perekonomian Kabupaten Balangan masih konsisten bertumpu pada sektor primer (usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan usaha pertambangan).

Tabel 7. Kontribusi (%) Sektoral PDRB Kabupaten Balangan 2018-2021

Lapangan Usaha	Kontribusi (%)
----------------	----------------

		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,63	12,03	12,23	11,97
B	Pertambangan dan Penggalian	62,14	60,58	58,92	60,69
C	Industri Pengolahan	1,93	1,93	1,98	1,97
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,26	0,28	0,26
F	Konstruksi	4,44	4,53	4,68	4,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	5,81	5,97	5,71
H	Transportasi dan Pergudangan	1,90	1,99	2,02	1,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,36	0,38	0,36
J	Informasi dan Komunikasi	1,33	1,35	1,47	1,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,35	0,38	0,35
L	Real Estate	0,98	1,01	1,08	1,04
M, N	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,72	5,15	4,63
P	Jasa Pendidikan	3,26	3,43	3,70	3,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,94	1,03	1,04
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,54	0,58	0,61	0,57
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021

Pada tahun 2018 kontribusi sektor primer ini mencapai 73,77 persen turun menjadi 72,66 persen di tahun 2021. Penurunan ini tentu diikuti oleh peningkatan di sektor sekunder dan tersier (usaha perdagangan, usaha real estate, dan jasa). Kondisi yang menunjukkan telah terjadi pergeseran perekonomian, yaitu dengan berkurangnya dominasi pertanian dan pertambangan.

Pengaruh besar Sektor pertambangan dalam perekonomian Kabupaten Balangan, ditunjukkan oleh kontribusi yang besar sektor pertambangan terhadap PDRB yang mencapai 60,69 persen di tahun 2021. Hal ini menandakan pula ketergantungan yang besar terhadap sektor pertambangan. Sedangkan penyumbang ke tiga (setelah pertambangan dan pertanian) perekonomian adalah sektor perdagangan, sebesar 5,71 persen tahun 2021 yang banyak disumbang oleh sub perdagangan besar dan eceran.

4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan produktivitas atau pergerakan aktifitas ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui pertumbuhan ekonomi dimungkinkan adanya perluasan kapasitas ekonomi dalam bentuk terbukanya peluang usaha baru, investasi baru, dan kesempatan kerja yang tinggi. PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB berdasarkan harga berlaku menggambarkan struktur ekonomi suatu daerah yang dapat menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8

Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan
2018-2021

Lapangan Usaha		Pertumbuhan Ekonomi (%)			
		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,83	4,05	-1,80	3,54
B	Pertambangan dan Penggalian	2,59	2,59	-3,74	3,84
C	Industri Pengolahan	3,19	2,23	-2,75	4,26
D	Pengadaan Listrik, Gas	7,75	4,98	3,82	4,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,10	7,61	6,10	0,53
F	Konstruksi	2,38	2,30	-0,09	0,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,70	5,01	-1,10	1,23
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	5,01	-2,20	1,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,60	7,44	-0,26	1,34
J	Informasi dan Komunikasi	4,14	3,84	6,75	5,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,25	7,95	4,50	-3,99
L	Real Estate	5,45	2,86	2,48	3,39
M, N	Jasa Perusahaan	7,67	7,95	-2,60	4,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	6,68	3,60	-2,60
P	Jasa Pendidikan	4,66	4,70	3,78	2,15

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,72	5,32	5,87	8,88
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7,14	6,90	-1,18	1,04
RATA-RATA BALANGAN		3,13	3,16	-2,47	3,26
RATA-RATA KALSEL		5,08	4,09	-1,82	3,48

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2022

Sebagaimana Tabel 8, secara keseluruhan PDRB kabupaten Balangan di tahun 2021 tumbuh rata-rata 3,26 persen lebih rendah dari pertumbuhan propinsi Kalsel yang tumbuh 3,48 persen dalam periode yang sama, Pertumbuhan di tahun 2021 ini masih lebih rendah dibanding pertumbuhan sebelum pandemi covid-19, meskipun telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti jika dibanding pertumbuhan negatif di tahun 2020.

Ketergantungan pada sektor pertambangan yang cukup signifikan nampak pada fluktuasi ekonomin yang terjadi. Anjloknya pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan menjadi minus 2,47 persen pada tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan produksi pertambangan yang mencapai minus 3,74 persen, untuk itu Kabupaten Balangan perlu mengembangkan sektor lain sebagai basis pertumbuhannya.

4.2.4. Pendapatan Perkapita

PDRB Perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Dengan demikian PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata tingkat produksi ataupun pendapatan yang mampu diciptakan untuk setiap penduduk per tahun. Dengan demikian, angka ini juga menggambarkan sebearap besar kemampuan perekonomian untuk memberikan kemakmuran secara rata-rata ditengah pertambahan jumlah penduduk.

Tabel 9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Balangan 2018-2021

Tahun	PDRB Perkapita		PDRB Perkapita	
	ADHB (ribu Rp)	Pertumbuhan (%)	ADHK (ribu Rp.)	Pertumbuhan (%)
2018	83.021,34	5,20	70.430,92	1,53

2019	83.913,00	1,07	71.603,21	1,66
2020*	80.457,75	(4,12)	68.865,73	(3,82)
2021**	88.874,62	10,46	71.681,98	4,09

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2022

Berdasar Tabel 9, PDRB perkapita ADHB Kabupaten Balangan tumbuh dengan rata-rata 1,76 persen pertahun (2018-2021) lebih tinggi dibanding PDRB perkapita ADHK yang tumbuh rata-rata 0,44 persen per tahun. Nilai nominal pendapatan penduduk rata-rata di tahun 2021 telah mencapai Rp. 88,8 juta per tahun dan nilai ini lebih tinggi dibanding sebelum Covid-19, sedangkan secara riil pendapatan rata-rata penduduk tersebut mencapai rata-rata Rp. 71,7 juta per tahun, meningkat tipis dibanding sebelum Covid-19.

Memperhatikan kecenderungan umum PDRB perkapita yang terus meningkat, hal ini menjadi indikasi awal terjadi ekspansi ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Diharapkan kondisi ini secara nyata dapat memajukan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Balangan yang tentunya masih menggantungkan kepada pola distribusi atau ketimpangan yang sedang terjadi.

4.2.5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan

PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera diharapkan mengembangkan produk-produk layanannya berupa tabungan, kredit, deposito dan layanan lainnya. Strategi yang dilakukan dapat juga dengan membuka kantor kas dan memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam memberikan sumbangan ke APBD dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat kemampuan suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan

peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi Pendapatan Asli Daerah dalam kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Balangan dikemukakan dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan

URAIAN	REALISASI				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	88.095.992.054	68.649.415.232	82.522.528.225	86.176.610.153	130.439.194508
Pendapatan Pajak Daerah	10.910.153.810	11.015.165.463	13.420.168.379	13.378.574.067	11.417071.564
Pendapatan Retribusi Daerah	1.919.401.286	1.806.629.386	1.865.673.675	1.675.985.562	1.890.123.555
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.609.202.938	15.713.201.757	6.596.245.516	9.827.731.257	12.391951413
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.657.234.019	40.114.418.626	60.640.440.655	61.294.319.267	104.740.047.975
Jumlah Pendapatan	1.112.189.260.812	1.287.172.983.170	1.514.248.723.967	1.171.170.991.467	1.085.427.525.077
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan (%)	7,92%	5,33%	5,45%	7,36%	12,02%

Sumber: BPKPD Kabupaten Balangan, 2021

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Balangan selama tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap total penerimaan pendapatan masih rendah (0% sampai 25%) yaitu rata-rata selama tahun 2017 sampai 2021 sebesar 7,62%. Angka ini menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk terus memacu peningkatan PAD dari waktu ke waktu melalui serangkaian usaha.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 sampai 2026 menyampaikan proyeksi Anggaran PAD sebagaimana tertuang dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

URAIAN	PROYEKSI					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Asli Daerah	83.961.793.282	82.961.793.282	87.404.008.519	92.090.393.937,52	97.034.812.500	102.251.944.406
Pendapatan Pajak Daerah	11.765.022.948	11.765.022.948	12.647.399.669	13.595.954.644,28	14.615.651.242	15.711.825.085

Pendapatan Retribusi Daerah	1.733.889.000	1.733.889.000	1.820.583.450	1.911.612.622	2.007.193.253	2.107.552.916
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.847.692.278	10.847.692.278	11.390.076.891	11.959.580.736	12.557.559.773	13.185.437.761
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.615.189.056	58.615.189.056	61.545.948.508	64.623.245.934	67.854.408.230	71.247.128.642
Jumlah Pendapatan	1.177.660.512.378	1.293.572.850.765	1.355.502.206.377	1.420.497.588.875	1.488.712.641.552	1.560.308.781.137
Kontribusi PAD terhadap Jumlah Pendapatan (%)	7,13%	6,41%	6,45%	6,48%	6,52%	6,55%

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026

Proyeksi penerimaan PAD sebagaimana pada Tabel 11 tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai 2026, walaupun masih dalam rentang 0% sampai 25 % yang berarti masih rendah. Proyeksi PAD ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan dalam merencanakan penerimaan-penerimaannya belum merencanakan terobosan yang signifikan dan meyakinkan sehubungan dengan penggalian potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Namun demikian, pada tahun 2021 yang lalu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi sebesar 12,02% atau naik 4,66% dibandingkan tahun 2020 dan sudah melebihi proyeksinya.

4.2.6. Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran terbuka yang nilainya di tahun 2021 mencapai 2,40 persen dari jumlah penduduk usia kerja, tumbuh rata-rata 2,35 persen selama periode 2018-2021. Jumlah penganggur yang terus menerus meningkat tersebut mencapai puncaknya di tahun 2020 saat Covid-19 dan kembali menurun di tahun 2021 seiring dengan berakhirnya Covid-19 meskipun penurunan tersebut tidak sebesar pengangguran sebelum terjadinya Covid-19.

Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan

	2018	2019	2020	2021
TPT (%)	2,24	2,28	2,48	2,40
Jumlah PT (jiwa)		1.549	1.789	1768

Penduduk Miskin (Jiwa)	7.214	7.266	7.060	8.062
Kemiskinan (%)	5,59	5,55	5,32	6,07

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2022

Adapun Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan terus menerus mengalami peningkatan meskipun sempat berkurang di tahun 2020 dan puncaknya terjadi di tahun 2021 yang mencapai 8.062 jiwa. Tingkat kemiskinan sebagaimana Tabel 12 di atas rata-rata sebesar 5,63 persen (2018-2021), jumlah yang besar yang memerlukan penanganan lebih intensif serta kebijakan yang lebih tepat.

4.3. Analisis Non Keuangan

4.3.1. Analisis SWOT (Strenghts, Wekenesses, Opportunities, dan Threats)

Analisa masalah lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan permasalahan spesifik dari isu aktual yang nantinya akan menjadi masalah utama dengan menggunakan analisis SWOT, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal, meliputi:

a. Kekuatan

- 1) Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan lembaga cukup kuat, dengan dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah mencapai 2.4 Milyar
- 2) Pelayanan door to door, cepat, mudah dan terarah
- 3) Lokasi kantor dekat dengan pusat perbelanjaan/pasar rakyat yang memberikan potensi penghimpunan dan penyaluran dana.
- 4) Sarana dan prasarana yang dimiliki secara kuantitatif mendukung pelayanan kepada nasabah.
- 5) Kriteria bank yang sehat memberikan citra/image yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Kelemahan, meliputi:

- 1) Sumber dana pihak ketiga dan antar bank di nilai semakin mahal mengingat keterbatasan kemampuan BPR dalam menghimpun dana akibat penurunan profit margin perusahaan

- 2) Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki relative masih rendah
 - 3) Customer base masih belum digarap dengan maksimal dan kurang didukung dengan kualitas man power dibidang funding maupun lending
 - 4) Pengembangan SDM belum mengarah keunggulan komperatif
 - 5) Tingginya resiko kredit macet yang di hadapi oleh BPR
- c. Peluang, meliputi:
- 1) Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Balangan dan HST akan mendorong pendapatan masyarakat ditunjang dengan pertumbuhan infrastruktur yang harus di bangun dan ditingkatkan, sehingga menarik minat investor untuk beinvestasi dikabupaten balangan.
 - 2) Pemerintah saat ini sedang gencar mendorong perusahaan di sektor usaha kecil dan mikro untuk bertumbuh dan bekembang melalui alokasi kebijakan kredit di segala sektor dan diharapkan dapat membuka pasar BPR
 - 3) Kantor pusat BPR yang berada di Ibu Kota Kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar serta potensi penghimpunan dana maupun penyaluran dana dinilai cukup besar.
 - 4) BPR Sanggam Citra Sejahtera sebagai lembaga keuangan pedesaan yang sangat beorientasi pada usaha kecil dan mikro yang merupakan mayoritas usaha masyarakat di Kabupaten Balangan dan HST.
 - 5) Dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - 6) Wilayah Pemasarannya masih belum di gali, calon nasabah dari berbagai daerah yaitu Balangan dan Barabai akibat dari Pengabungan BPR
- d. Ancaman, Meliputi:
- 1) Produk aset liabilitas bank pesaing semakin aktif
 - 2) Bemunculan lembaga keuangan mikro yang sangat agresif dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta lembaga keuangan/bank besar saat ini melakukan ekspansi pada pangsa pasar BPR

- 3) Semakin banyak alternatif lembaga sumber-sumber dana keuangan diluar sektor perbankan
- 4) Perang tarif, promosi, persaingan di bidang mutu secara keseluruhan
- 5) Akibat pandemic covid-19 sehingga berdampak pada perekonomian di wilayah kabupaten balangan dan HST yang masih belum stabil
- 6) Keadaan yang volatile, Kemampuan konsumsi masyarakat yang rendah, Inflasi yang tinggi.

Tabel 13 berikut merupakan proses analisis SWOT :

Tabel 13. Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
No.	Srengths	No	Weaknesses
S1	Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam mendorong penguatan lembaga cukup kuat, dengan Dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah mencapai 2.4 Milyar	W1	Sumber dana pihak ketiga dan antar bank di nilai semakin mahal mengingat keterbatasan kemampuan BPR dalam menghimpun dana akibat penurunan profit margin perusahaan
S2	Pelayanan Door to door, cepat, mudah dan terarah	W2	Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki relative masih rencah
S3	Lokasi kantor dekat dengan pusat perbelanjaan/pasar rakyat yang memberikan potensi penghimpunan dan penyaluran dana.	W3	Customer base masih belum digarap dengan maksimal dan kurang didukung dengan kualitas man power dibidang funding maupun lending
S4	Sarana dan Prasarana yang dimiliki secara kuantitatif mendukung pelayanan kepada nasabah.	W4	Pengembangan SDM belum mengarah keunggulan komperatif
S5	Kriteria bank yang sehat memberikan citra/image yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.	W5	Tingginya resiko kredit macet yang di hadapi oleh BPR
FAKTOR EKSTERNAL			
No.	Opportunities	No.	Threats
O1	Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Balangan dan HST akan mendorong pendapatan masyarakat ditunjang dengan pertumbuhan infrastruktur yang	T1	Produk aset liabilitas bank pesaing semakin aktif

	harus di bangun dan ditingkatkan, sehingga menarik minat investor untuk beinvestasi dikabupaten balangan.		
O2	Pemerintah saat ini sedang gencar mendorong perusahaan di sektor usaha kecil dan mikro untuk bertumbuh dan berkembang melalui alokasi kebijakan kredit di segala sektor dan diharapkan dapat membuka pasar BPR	T2	Bemunculan lembaga keuangan mikro yang sangat agresif dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta lembaga keuangan/bank besar saat ini melakukan ekspansi pada pangsa pasar BPR
O3	Kantor pusat BPR yang berada di Ibu Kota Kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar serta potensi penghimpunan dana maupun penyaluran dana dinilai cukup besar.	T3	Semakin banyak alternatif lembaga sumber-sumber dana keuangan diluar sektor perbankan
O4	BPR Sanggam Citra Sejahtera sebagai lembaga keuangan pedesaan yang sangat beorientasi pada usaha kecil dan mikro yang merupakan mayoritas usaha masyarakat di Kabupaten Balangan dan HST.	T4	Perang tarif, promosi, persaingan di bidang mutu secara keseluruhan
O5	Dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	T5	Akibat pandemic covid-19 sehingga berdampak pada perekonomian di wilayah kabupaten balangan dan HST yang masih belum stabil
O6	Wilayah Pemasarannya masih belum di gali, calon nasabah dari berbagai daerah yaitu Balangan dan Barabai akibat dari Pengabungan BPR	T6	Keadaan yang volatile, Kemampuan konsumsi masyarakat yang rendah, Inflasi yang tinggi

Dari tabel diatas di dapat Faktor – faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam aksi perubahan dengan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Langkah selanjutnya adalah memberikan bobot pada masing-masing faktor tersebut.

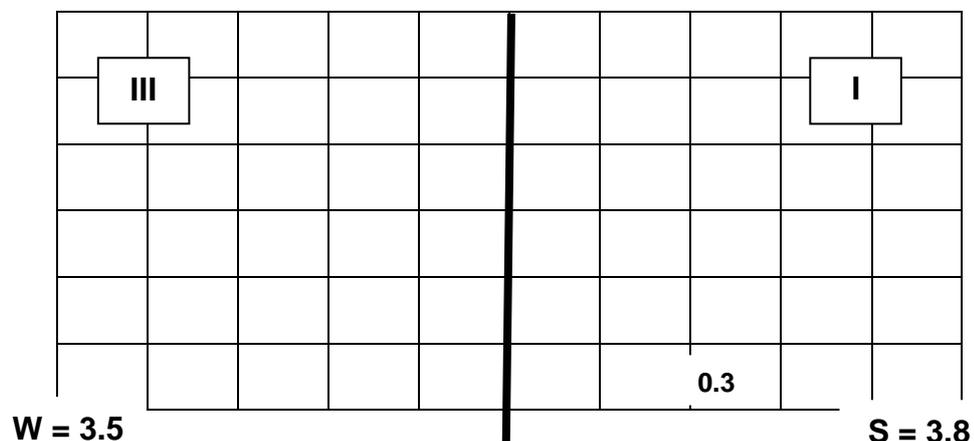
Tabel 14. Pembobotan SWOT

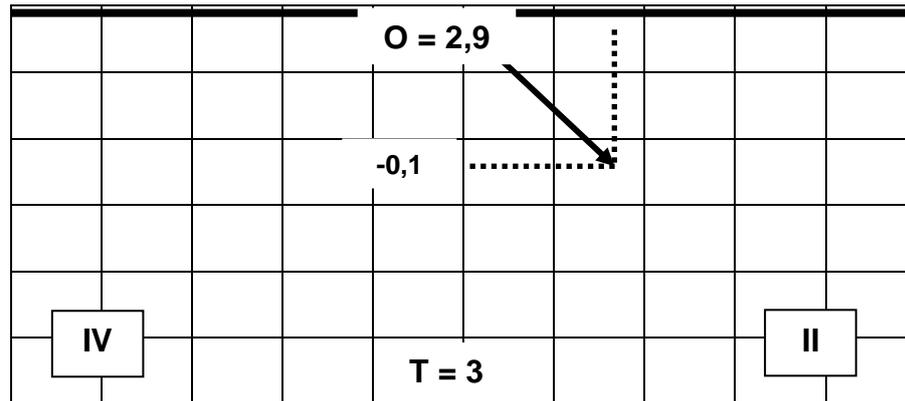
Analisis SWOT	Bobot	Rating	Bobot x Rating	
Internal Factor (IFAS)				
STRENGTHS				
1. Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam mendorong penguatan lembaga cukup kuat, dengan Dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah mencapai 2.4 Milyar	0.3	4	1.2	
2. Pelayanan <i>Door to door</i> , cepat, mudah dan terarah.	0.1	1	0.1	
3. Lokasi kantor dekat dengan pusat perbelanjaan/pasar rakyat yang memberikan potensi penghimpunan dan penyaluran dana.	0.1	2	0.4	
4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki secara kuantitatif mendukung pelayanan kepada nasabah.	0.2	3	0.6	
5. Kriteria bank yang sehat memberikan citra/image yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.	0.3	5	1.5	
Total	1		3.8	
WEAKNESSES				
1. Sumber dana pihak ketiga dan antar bank di nilai semakin mahal mengingat keterbatasan kemampuan BPR dalam menghimpun dana akibat penurunan profit margin perusahaan	0.3	5	1.5	
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki relative masih rendah	0.2	2	0.4	
3. Customer base masih belum digarap dengan maksimal dan kurang didukung dengan kualitas man power dibidang funding maupun lending	0.1	3	0.3	
				S-W = 3.8 - 3.5 = 0.3

4. Pengembangan SDM belum mengarah keunggulan komperatif	0.1	1	0.1	
5. Tingginya resiko kredit macet yang di hadapi oleh BPR	0.3	4	1.2	
Total	1		3.5	
Eksternal Factor (EFAS) OPPORTUNITIES				
1. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Balangan dan HST akan mendorong pendapatan masyarakat ditunjang dengan pertumbuhan infrastruktur yang harus di bangun dan ditingkatkan, sehingga menarik minat investor untuk beinvestasi dikabupaten balangan.	0.2	5	1	
2. Pemerintah saat ini sedang gencar mendorong perusahaan di sektor usaha kecil dan mikro untuk bertumbuh dan berkembang melalui alokasi kebijakan kredit di segala sektor dan diharapkan dapat membuka pasar BPR	0.2	4	0.8	
3. Kantor pusat BPR yang berada di Ibu Kota Kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar serta potensi penghimpunan dana maupun penyaluran dana dinilai cukup besar.	0.1	1	0.1	O-T = 2.9-3= -0.1
4. BPR Sanggam Citra Sejahtera sebagai lembaga keuangan pedesaan yang sangat beorientasi pada usaha kecil dan mikro yang merupakan mayoritas usaha masyarakat di Kabupaten Balangan dan HST.	0.1	2	0.2	
5. Dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	0.2	3	0.6	
6. Wilayah Pemasarannya masih belum di gali, calon nasabah dari berbagai daerah yaitu Balangan dan Barabai	0.2	1	0.2	

akibat dari Penggabungan BPR			
Total	1		2.9
THREATS			
1. Produk aset liabilitas bank pesaing semakin aktif	0.2	5	1
2. Bemunculan lembaga keuangan mikro yang sangat agresif dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta lembaga keuangan/ bank besar saat ini melakukan ekspansi pada pangsa pasar BPR	0.2	4	0.8
3. Semakin banyak alternatif lembaga sumber-sumber dana keuangan diluar sektor perbankan	0.2	3	0.6
4. Perang tarif, promosi, persaingan di bidang mutu secara keseluruhan	0.1	1	0.1
5. Akibat pandemic covid-19 sehingga berdampak pada perekonomian di wilayah kabupaten balangan dan HST yang masih belum stabil	0.1	1	0.1
6. Keadaan yang volatile, Kemampuan konsumsi masyarakat yang rendah, Inflasi yang tinggi	0.2	2	0.4
Total	1		3

Menetapkan Peta Organisasi





Gambar 3. Peta Kekuatan Organisasi

Total nilai bobot (TNB) pada analisa tersebut di atas di dapat hasil kekuatan sebesar 3.8, kelemahan sebesar 3,5, peluang sebesar 2.9, dan ancaman/tantangan sebesar 3. Nilai kekuatan sebenarnya adalah hasil pengurangan nilai kekuatan dengan kelemahan yaitu $3.8 - 3,5 = 0,3$, sedangkan nilai peluang sebenarnya adalah hasil pengurangan nilai peluang dengan ancaman, yaitu $2.9 - 3 = -0.1$

Jika kedua nilai tersebut dimasukan kuadran, maka kondisi tersebut berada pada kuadran II (lihat Gambar 3 Peta Kekuatan Organisasi) yang mencirikan peluang yang sangat besar dalam menghadapi suatu tantangan organisasi. Strategi yang cocok diterapkan adalah melakukan diversifikasi.

Persaingan antar bank semakin ketat, terbukti dengan sulitnya bank untuk meraih nasabah yang akan mempercayakan bank tersebut dalam menyimpan dananya. Strategi yang dapat dilakukan adalah strategi diversifikasi, artinya bank tidak terkonsentrasi menyalurkan kredit pada satu atau dua sektor ekonomi tertentu. Strategi pengambilalihan bank BPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan strategi yang tepat untuk meminimalisir persaingan. PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera juga penting untuk memperhatikan sektor-sektor potensial lainnya seperti di sektor pertanian.

Diversifikasi merupakan bagian dari sebuah strategi korporat yang dilakukan demi meningkatkan jumlah penjualan melalui sistem produk baru dan juga pasar baru. Dengan menggunakan cara ini, maka mudah bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan dan memperluas usaha untuk masuk menuju segmentasi pasar baru dari sebuah industri bisnis yang ada ataupun berinvestasi

pada bisnis yang tengah menjanjikan baik yang berasal dari luar area bisnis yang sebelumnya telah dimasuki oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Moses (*International Journal Management*) dengan judul *Diversification Strategies In The Banking Industry In Kenya*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tiga jenis strategi (diversifikasi horizontal, vertikal diversifikasi dan diversifikasi geografis) lazim dalam perbankan industri di Kenya. Tetapi strategi yang paling banyak digunakan adalah diversifikasi horizontal yang diikuti oleh diversifikasi geografis. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa bank adalah menggunakan berbagai strategi diversifikasi dalam industri agar dapat bersaing dalam pasar. Mengenai manfaat diversifikasi bank, tercatat bahwa manfaatnya termasuk lebih besar potensi pertumbuhan pendapatan, peningkatan kinerja saluran distribusi, risiko kontrol, akuisisi teknologi baru, dan perubahan fokus bisnis.

Pada dasarnya strategi diversifikasi produk merupakan salah satu strategi yang penting di dalam meningkatkan volume penjualan. Strategi diversifikasi adalah suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 1) Diversifikasi Konsentris Dimana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran, teknologi dengan produk yang sudah ada. 2) Diversifikasi Horizontal Dimana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. 3) Diversifikasi Konglomerat Dimana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Diversifikasi sebagai suatu bagian daripada strategi produk ialah perluasan pengembangan barang dan jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan, dengan jalan penambahan produk atau jasa yang baru. Yang dimaksud baru, yakni di dalam rangka pengembangan barang yang ada. Dalam hal ini, dibedakan antara diversifikasi praktis, yang berarti peningkatan jumlah warna, model, ukuran, dan sebagainya, dengan diversifikasi strategis, yang mengandung konsekuensi produk yang sama sekali berlainan.

4.3.2. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karenanya BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 304 ayat (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk

pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.

Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda tersendiri untuk mengaturnya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki tujuan dalam hal: (a) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, (b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (c) mengungkit pendapatan masyarakat, serta (d) penyerapan tenaga kerja. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. Penyertaan modal Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai *agent of development*. Oleh karena itu, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja,

dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam kegiatan ekonomi tertentu.

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam bentuk investasi daerah harus memperhatikan 5 (lima) prinsip yang penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Legalitas

Pemerintah Daerah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat wajib bertanggungjawab atas setiap kebijakan dan tindakan sesuai peraturan yang ada. Begitu pula dengan investasi daerah harus berdasarkan perangkat perundang-undangan yang berlaku. Investasi jangka pendek tidak perlu mendapatkan persetujuan lembaga legislatif, namun hanya cukup dengan peraturan yang ada. Investasi yang bersifat jangka panjang, keputusan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan melalui Lembaga legislatif.

2) Keamanan

Keputusan investasi daerah harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

3) Likuiditas

Fungsi likuiditas menekankan pada kemudahan dalam hal pencairan kembali agar digunakan sewaktu-waktu saat pemerintah membutuhkan

kas secara mendadak. Namun, prinsip ini tidak berlaku bagi investasi yang tidak untuk ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

4) Keuntungan

Selain untuk menyejahterakan masyarakat, investasi daerah juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah.

5) Kesesuaian

Pemilihan investasi harus menyesuaikan dengan peraturan yang terkait agar tidak ada yang mempersoalkan secara hukum pilihan tersebut.

Pengaturan mengenai pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait, peraturan-peraturan itu dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 15. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah

No	Peraturan	Tentang	Perihal	Keterangan
1.	UU RI No. 17 Tahun 2003	Keuangan Negara	Penyertaan modal pada Perusahaan Negara/Daerah	Pasal 3 ayat (7) dan ayat (8)
			berasal dari surplus anggaran, surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya, penggunaan surplus penerimaan negara/daerah membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan	

			terlebih dahulu dari DPR/DPRD.	
2.	UU RI No. 17 Tahun 2003	Keuangan Negara	Bab peraturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, dan pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta	Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7)

- setelah mendapat persetujuan DPR.
3. UU RI No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, investasi tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 41
 4. PP RI No. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pasal 75

- | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5. | PERMENDAG
RI
No. 13 Tahun
2006 | Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah | APBD
surplus yakni
pendapatan daerah
diperkirakan lebih besar
dari anggaran belanja
daerah, diutamakan untuk
pembayaran pokok utang,
penyertaan modal
(investasi) daerah,
pemberian pinjaman
kepada pemerintah
pusat/pemerintah daerah
lain dan/atau pendanaan
belanja peningkatan
jaminan sosial. | diperkirakan
anggaran
daerah
lebih besar
belanja
untuk
utang,
modal
daerah,
pinjaman
pemerintah
daerah
pendanaan
peningkatan
sosial. | Pasal 56 |
| 6. | UU RI No. 40
Tahun 2007 | Perseroan
Terbatas | Pendirian badan hukum
negara atau daerah wajib
ditetapkan melalui
peraturan, dalam hal
pendiri adalah badan
hukum negara atau
daerah, diperlukan
Peraturan Pemerintah
tentang penyertaan dalam
Perseroan atau Peraturan
Daerah tentang
penyertaan daerah dalam
Perseroan. | badan hukum
daerah wajib
melalui
dalam hal
badan
atau
diperlukan
Pemerintah
dalam
Peraturan
Daerah dalam
Perseroan. | Penjelasan
Pasal 8 ayat
(2) hurup a. |
| 7. | PP RI No. 8
Tahun 2008,
jo. PP RI No.
49
Tahun 2011 | Investasi
Pemerintah | Penyertaan modal
merupakan bagian dari
investasi langsung oleh
badan investasi
pemerintah untuk | modal
bagian dari
oleh
investasi
untuk | Pasal 1
angka 4PP
49/2011 |

membiayai kegiatan usaha. Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara:

1. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Penyertaan modal sebagai bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

8. PERMENDAG Pedoman Penyertaan Modal Pasal 72
RI No. 52 Pengelolaan Pemerintah Pusat/Daerah
Tahun 2012 Investasi

Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1. Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
2. Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

9. PERMENDAG RI No. 52 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Investasi Penyerahan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pasal 73 ayat (1)

Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah; tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

10. UU RI No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu BUMD dan/atau milik swasta, penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD, dan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 304
11. UU RI No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Bahwa dalam kondisi APBD surplus maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda. Pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk pembiayaan: Pasal 305

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 2. Penyertaan modal daerah; 3. Pembentukan dana cadangan; serta 4. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
12.	PP RI No. 27 Tahun 2014	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	<p>Pengertian mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah, yaitu pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.</p> <p>Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik</p>	Pasal angka 21	1

Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 13. | PP RI No. 54 Tahun 2017 | Badan Usaha Milik Daerah | Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk: | Pasal 21 ayat (2) s.d (4) |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian BUMD; 2. Penambahan modal BUMD; dan 3. Pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. | |
| | | | <p>Penyertaan modal tersebut dapat berupa uang dan barang milik Daerah, untuk barang milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal harus dilakukan penafsiran harga barang milik Daerah, untuk mendapatkan nilai riil pada saat barang milik Daerah tersebut dijadikan penyertaan modal</p> | |

Daerah. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Sedangkan Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

1. Pengembangan usaha;
2. Penguatan struktur permodalan; dan
3. Penugasan Pemerintah Daerah

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Berdasarkan analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat melakukan penyertaan modal jika jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan sebelumnya pada peraturan daerah pada tahun anggaran dan jika APBD mengalami surplus yakni anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

4.3.3. Aspek Penyertaan Modal

4.3.3.1. Jenis Penyertaan Modal

Jenis penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Balangan merupakan jenis penanaman modal atau investasi secara langsung. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk/jenis, yaitu:

1. Investasi langsung, adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Polanya bisa bermacam-macam, perusahaan yang menjalankan bisnis berbentuk perseroan terbatas atau CV, dana yang dihasilkan dapat ditukarkan pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain dana menjadi equity pada perusahaan. Dana yang sudah dalam bentuk equity biasanya akan dipakai sebagai modal tambahan. Hasil yang diperoleh berupa deviden akan dibagikan setiap akhir tahun. Model ini tidak berbeda dengan membeli saham di pasar modal. Hanya saja, saham di pasar modal dengan mudah bisa diperjualbelikan dan harganya bisa naik turun. Sementara, jika menempatkan dana sebagai saham di perusahaan yang belum go public, harganya lebih bersifat statis.
2. Investasi surat berharga, adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor dalam instrument-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27). Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

4.3.3.2. Posisi Modal dan Skema Penyertaan Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 14 tahun 2017 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas. Modal dasar Perseroan (PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera) per Desember 2021 adalah sebesar Rp. 30.375.350.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu upiah), dan modal

disetor sebanyak Rp. 9.109.300.000,- (sembilan milyar seratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah terdiri dari penyertaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 454.150.000,- (empat ratus lima puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 4,99%; Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan proporsi penyertaan 93,31%; Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan proporsi penyertaan 0,05%; dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 150.800.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan proporsi penyertaan 1,65%. Dengan kondisi itu, sepanjang tahun 2022, PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera berencana akan menghimpun dana sebesar Rp. 5.629.036.911,- (lima milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari tabungan sebesar Rp. 3.713.836.911,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sebelas), dan deposito sebesar Rp. 1.915.200.000,-. Pada target ini, porsi penghimpunan dana kantor pusat memiliki porsi target sebesar 70% dari total penghimpunan dana. Kemudian untuk ekspansi kredit selama tahun 2022, PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera menargetkan tumbuh sebesar 12,65% atau mencapai baki debit sebesar Rp. 15.742.426.579,-(lima belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan). Usaha pencapaian target ekspansi kredit ini dibagi pada kantor pusat di Kabupaten Balangan dan Kantor Cabang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kantor pusat dengan target sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kantor Cabang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan asumsi rata-rata pengembalian pokok per bulan Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga target yang ditetapkan RBB Tahun 2022 dicapai. Dalam rangka peningkatan ekspansi kredit dan kebermanfaatannya PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera pada masyarakat Kabupaten Balangan, maka pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menyertakan modal tambahan dengan penugasan khusus untuk penyaluran kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan bunga 0% dari 50% penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang telah disetor kepada PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah). Pada rencana peraturan baru tahun 2022 Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2023 dengan perincian: 1) Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan 2) Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa perbankan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, memperoleh laba dan/atau keuntungan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam hal ini melakukan setoran kepada BPR Sanggam Citra Sejahtera dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan UMKM dengan penyaluran pembiayaan dari PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera. Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan suatu usaha dengan melakukan investasi atau penanaman modal langsung, dengan skema seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Skema Penyertaan Modal Pemda Kab. Balangan

Skema di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam hal ini melakukan setoran kepada BPR Sanggam Citra Sejahtera dalam 2 (dua) tahap, yaitu: tahap 1 (satu) setoran sebanyak Rp.5.000.000.000,- dan tahap ke-2 (dua) Rp.5.000.000.000,- . Setoran sebanyak Rp.5.000.000.000,- (50% dari total penyertaan) diorientasikan untuk penugasan pada PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera untuk penyaluran kredit dengan bunga 0% pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha Mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif yang dijalankan oleh Individu/perorangan, kelompok, atau Lembaga yang bergerak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengolahan/industry kecil, sektor perdagangan serta jasa. UMK yang memperoleh kredit 0% dari PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera adalah usaha yang berlokasi di Kabupaten Balangan dan dijalankan oleh oleh Individu/perorangan atau kelompok penduduk Kabuapten Balangan. Sedangkan PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten HST tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkan kredit dengan bunga 0%, tetapi memberikan kredit dengan mekanisme pasar. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang disetorkan pada PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai modal/saham daerah pada BUMD PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera. Untuk kesinambungan penyaluran kredit bunga 0%, PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera berkewajiban menyampaikan pelaksanaan program kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan para pemegang saham secara bulanan atau maksimal 1(satu) kali dalam setahun melalui RUPS. Program penyaluran kredit pada UMK dengan bunga 0% akan dihentikan sementara apabila NPL PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera dalam operasional tahun berjalan diatas 5%.

4.3.4. Aspek Pasar dan Pemasaran

4.3.4.1. Profil PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera

PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera merupakan Perusda Pemerintah Kabupaten Balangan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan berkedudukan di kota Paringin. Pendirian PT. BRR Sanggam Citra Sejahtera dengan dasar hukum akta pendirian No. 80 tanggal 28 Mei 2018 oleh Notaris Neddy Farmanto, SH. Pada awalnya PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera berupa BUMD berupa Bank Perkreditan Rakyat Paringin. Dasar pendirian BPR Paringin diatur dengan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2008 jo No. 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat dan memperluas layanan kredit untuk masyarakat, PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera mengakuisisi (merger) PT. BPR HST dengan akta penegasan penggabungan No. 77 tanggal 28 Mei 2021 oleh Notaris Noor Hasanah, SH, dan diperkuat dengan Keputusan KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0031219.AH.01.02. TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera.

PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera merupakan salah satu perbankan yang berlokasi di pusat kota Paringin. Kegiatan usaha dan pelayanan produk PT BPR Sanggam Citra Sejahtera meliputi:

- a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b). Memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus melakukan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c). menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, giro, sertifikat deposito, tabungan dan deposito berjangka pada bank lainnya.

Berikut ini profil PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera berdasarkan kegiatan usaha dan pelayanan serta asset keuangan selama Tahun 2020-2021.

Tabel 16. Produk dan Aset Keuangan PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera

Keterangan	Desember 2020		Desember 2021	
	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
Tabungan	Rp 3.524.602.000	1246 Penabung	Rp 3.796.938.000	1891 Penabung
Deposito	Rp 690.000.000	7 Deposito	Rp 1.695.000.000	9 Deposito
Kredit	Rp11.022.006.000	344 Debitur	Rp14.202.731.000	652 Debitur
Aset Keuangan				
Modal Dasar	Rp30.000.000.000		Rp30.375.350.000	
Modal Disetor	Rp 9.000.000.000		Rp 9.109.300.000	
Modal Inti	Rp10.244.581.000		Rp10.419.889.000	
Total Asset	Rp15.165.384.000		Rp16.642.565.000	

Sumber: <https://perbarindo.org/> (diakses, 9 November 2022)

Berdasarkan Tabel 16 di atas terlihat bahwa perkembangan Total Asset PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera mencapai Rp. 16.642.565.000,- per 31 Desember 2021 meningkat sebesar 9,74% dari tahun sebelumnya. Kemudian penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka mencapai Rp. 5.491.938.000,- meningkat sebesar 30,31% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan tabungan sebesar 7,73% dari Rp. 3.524.602.000,- tahun 2020 menjadi Rp. 3.796.938.000,- tahun 2021, sedangkan peningkatan deposito mencapai 145,65% yaitu meningkat dari Rp. 690.000.000,- tahun 2020 menjadi Rp. 1.695.000.000,- tahun 2021 dengan jumlah depositan sebanyak 9 depositan. Peningkatan pada penghimpunan dana dari masyarakat ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Balangan dalam hal menyimpan dananya di PT. PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera untuk keamana dananya.

Sedangkan pada sisi pembiayaan atau penyaluran kredit, kinerja penyaluran kredit PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera menunjukkan peningkatan sebesar 28,86%. Jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 11.022.006.000,- tahun 2020 menjadi Rp. 14.202.731.000,- tahun 2021, dengan jumlah debitur (penerima kredit) sebanyak 344 debitur tahun 2020 bertambah pada tahun 2021 menjadi 652 debitur atau meningkat sebesar 89,53%. Peningkatan kebutuhan pembiayaan dari PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Balangan memerlukan sumberdana dalam aktivitas penunjang ekonominya. Orientasi BPR adalah melayani usaha kecil dan menengah (UMK), oleh karena itu peningkatan jumlah kredit yang di salurkan PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera per Desember 2021 menunjukkan bahwa semakin banyak UMK yang memerlukan permodalan dalam pengembangan usahanya dan pelaku usaha UMK memutuskan opsi pada PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera.

4.3.4.2. Produk dan Jenis layanan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, atau dari berbagai kriteria lain. Bank Perkreditan Rakyat biasanya memberikan kredit mikro kepada para nasabahnya, yang mana istilah kredit mikro dapat diartikan sebagai kredit yang diberikan dalam jumlah relatif kecil untuk membiayai berbagai jenis usaha dalam skala ekonomi menengah kebawah. Sejauh ini tidak terdapat batasan yang jelas tentang pengertian (kriteria) kredit mikro, namun dalam praktek perbankan kredit mikro dapat disamakan dengan istilah Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kriteria tersebut antara lain jumlah *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,-, dan total asset debitur maksimum Rp. 600.000.000, dan kriteria itu sendiri secara periodik dievaluasi dan diubah oleh Bank Indonesia.

Secara umum jenis-jenis kredit Bank Perkreditan Rakyat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a). Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dapat diklasifikasikan atas:

- 1). Kredit Produktif, adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses suatu usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kredit produktif ini dapat dibagi lagi menjadi: a) Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan oleh debitur untuk pembelian barang-barang modal yang akan digunakan dalam jangka menengah atau jangka panjang, dan jumlahnya relatif kecil; dan b) Kredit Modal Kerja, yakni kredit yang digunakan oleh debitur untuk tujuan pembiayaan modal kerja dalam operasi normal suatu usaha.
 - 2). Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
- b). Berdasarkan jangka waktu kredit, dapat dibagi menjadi :
- 1). Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun,
 - 2). Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.
- c). Berdasarkan penarikannya, kredit dapat dibagi menjadi :
- 1). Penarikan sekaligus, yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman,
 - 2). Penarikan bertahap, yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak BPR.
- d). Berdasarkan sifat pelunasannya, kredit dibedakan menjadi :
- 1). Pelunasan dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh pihak BPR dengan debitur,
 - 2). Pelunasan tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang telah diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
- e). Dilihat dari Jaminan terdiri dari:

- 1). Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan pihak ketiga,
 - 2). Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu tetapi diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan BPR atau pihak lain.
- f). Dilihat dari segi sektor usaha, terdiri dari:
- 1). Kredit pertanian,
 - 2). Kredit peternakan,
 - 3). Kredit industri kecil,
 - 4). Perdagangan.

Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu resiko kredit. PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera merupakan salah satu perbankan yang berlokasi di pusat kota Paringin. Terkait dengan penyaluran kredit BPR ini juga melakukan prinsip kehati-hatian dan dilanjutkan dengan melakukan analisa kredit untuk UMKM yang mengajukan kredit di BPR serta ada tahapan wawancara terkait pengajuan dana tersebut.

Penyaluran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera maka perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor usaha yang produktif untuk skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta selalu menjaga hubungan yang harmonis antara nasabah dengan Bank dalam rangka menghindari terjadinya kredit macet.

4.3.4.3. Persaingan Usaha

BPR merupakan salah satu bentuk *commercialized institutional microfinance* (usaha pembiayaan mikro komersial yang legal) yang utamanya ditujukan untuk memacu perkembangan ekonomi lokal dengan target pasar rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro dan kecil, sehingga

diharapkan dapat melayani pangsa pasar khusus yang belum dapat dijangkau oleh bank umum (Hamada, 2010). Sebagian besar literatur dan studi terapan telah menganalisis secara khusus efektivitas dan kesuksesan dalam hal pengurangan kemiskinan melalui program kredit mikro (Pitt & Khandker, 1998); (Madajewicz, 2003), dalam hal ini BPR memiliki peran vital dalam penyaluran kredit mikro. Namun demikian, saat ini BPR berkompetisi dengan bank umum yang memiliki unit layanan mikro bank, koperasi simpan pinjam dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT/*Islamic microfinance institution*), Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui beberapa bank umum serta dengan rentenir (*predatory lenders*). Selain itu era disrupsi saat ini tidak terelakan lagi, sehingga persaingan di sektor bisnis perbankan tidak hanya antar bank tetapi juga dengan Lembaga keuangan *non-bank*, serta *fintech peer to peer lending* yang memberikan pinjaman secara *online* (pinjol) yang jumlahnya semakin banyak dan semakin gencar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan cepat. Persaingan semakin kompleks karena di era disrupsi, terjadi perubahan perilaku masyarakat secara masif, di mana masyarakat menghendaki kondisi yang serba praktis dan cepat.

Perubahan kebutuhan terhadap produk layanan perbankan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, semakin ketatnya persaingan antar lembaga jasa keuangan terutama dengan bank umum maupun *fintech*, serta dibutuhkan infrastruktur IT yang andal untuk menghadapi risiko terkait keamanan data. Perubahan era disrupsi 4.0 dalam bentuk *fintech* semakin meningkatkan penggunaan perangkat digital yang menjadikan masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengakses produk jasa keuangan perbankan. *Fintech* tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga tumbuh dengan pesat di negara berkembang seperti Indonesia dan merambah ke daerah-daerah. Keberadaan *fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. BPR saat ini harus semakin inovatif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terutama dengan keberadaan *fintech* dan bank umum dan bank asing yang menempatkan pembiayaannya secara besar-besaran pada sektor kredit mikro. *Fintech peer to peer lending* yang sebagian besar memberi kredit kepada UMKM yang menjadi pasar utama BPR dalam penyaluran kreditnya. Serta Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan

suku bunga yang di subsidi oleh APBN sehingga bunga kredit KUR semakin kompetitif menjadikan UMKM memiliki banyak pilihan dalam untuk mengakses permodalan.

Untuk menghadapi kompetisi tersebut, BPR harus memiliki kesiapan untuk melakukan perbaikan terus menerus dalam menghadapi era disrupsi 4.0 dan kondisi perbankan saat ini yang sedang mengalami transformasi yang cepat (radikal), yaitu dengan adanya produk baru, pemain baru, dan saluran baru yang muncul setiap hari dan berlangsung di semua sektor industri perbankan. Teknologi informasi adalah salah satu masalah utama manajemen bank, didorong oleh besar dan meningkatnya biaya pada saat tekanan kompetisi tidak lebih besar dari sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan gambaran beberapa hal titik lemah BPR yaitu (1) soal modal yang perlu ditingkatkan karena banyak BPR bermodal kecil, (2) kemampuan manajemen yang dirasa perlu terus ditingkatkan, (3) *governance* yang lemah karena masih sering terjadi *conflict of interest* yang mengakibatkan kebangkrutan, (4) teknologi informasi yang belum memadai, (5) kebijakan pemerintah yang tidak mendukung BPR.

Di samping dari adanya tantangan-tantangan tersebut, BPR juga memiliki peluang terkait akselerasi transformasi digital diantaranya adalah pertumbuhan permintaan akan layanan perbankan digital yang inovatif dan variatif. Kemudian, berpegang pada sifat loyal para nasabah, BPR yakin bahwa perubahan layanan transformasi digital masih belum terlambat terutama besarnya peluang kerja sama bersama *fintech*, pengembangan produk uang elektronik dan *mobile banking*. Untuk itu, diperlukan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah yang pada umumnya memiliki BPR untuk mendukung dan melindungi keberadaan BPR dengan menyetarakan statusnya setara dengan bank umum agar lebih maksimal dalam fungsi intermediasinya terutama bidang perkreditan mikro. Melakukan kerjasama *dengan BPR lainnya dan melakukan kerjasama dengan fintech penyalur kredit online* yang secara resmi terdaftar di OJK diperkuat dengan regulasi yang mendukung kerjasama BPR dengan *fintech*. Inovasi dalam layanan perbankan digital dengan melakukan kerja sama jaringan ATM dengan bank-bank umum serta kolaborasi untuk

menerbitkan uang elektronik. Inovasi layanan harus secara paralel dengan perbaikan manajemen dan internal BPR dari sisi integritas dan *attitude*.

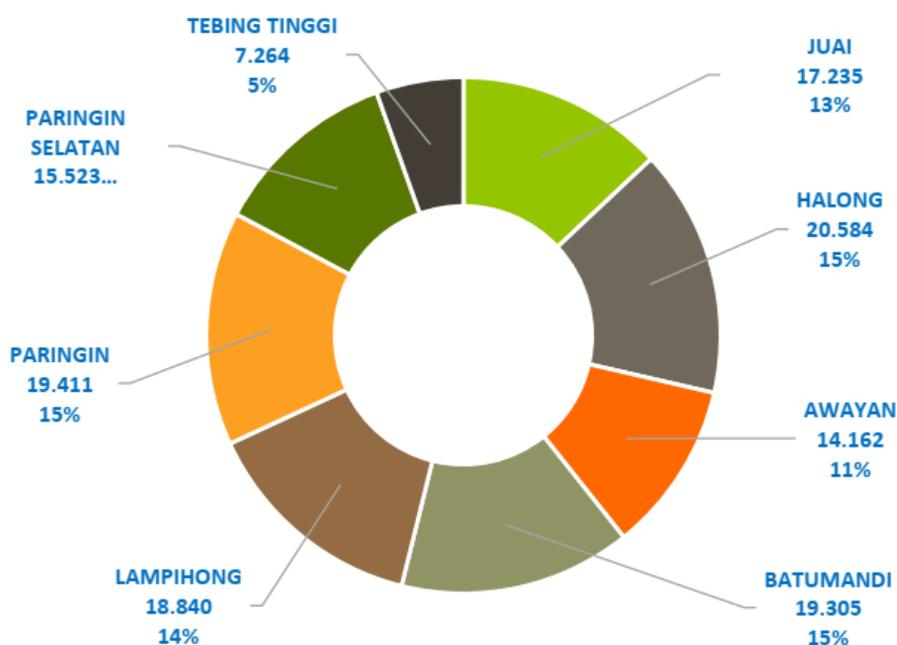
Mengantisipasi kondisi persaingan diatas, PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera telah menyusun perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis (Renbis). Rencana Bisnis ini sebagai acuan pada sasaran jangka pendek maupaun jangka Panjang. Renbis jangka pendek PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera tahun 2022 yaitu (1) menurunkan NPL yang masih mencapai 13,82% dengan melakukan analisis kredit yang detil dan seleksi nasabah potensial, (2) melakukan tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*) dengan menambah staf sesuai tupoksi dan tida rangkap jabatan serta digitalisasi pelayanan nasabah (*core banking-marstech*), (3) memperluas wilayah penyaluran kredit, dan menambah jaaringan kantor pelayanan kas. Adapun target jangka menengah adalah (1) meningkatkan asset sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000.000.-, (2) memperkuat permodalan dengan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pemegang saham.

Untuk mencapai sasaran jangka pendek maupun jangka menengah PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera telah Menyusun pedoman arah kebijakan yaitu: pertama, arah kebijakan Jangak Pendek Tahun 2022 : (a) menurunkan tingkat rasio NPL mencapai 10%, (b) menjalankan usaha BPR berdasarkan perinsip kehati-hatian secara konsisten, (c) menjalankan kegiatan usaha secara sehat, dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur, (d) menjalankan perinsip-perinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015, (e) menjaga hubungan baik dengan para memegang saham dengan selalu berusaha bekerja dengan baik agar dapat memberikan deviden kepada para pemegang saham. Kedua arah kebijakan jangka menengah yaitu dengan cara terus memperkuat modal, bukan hanya modal disetor atau modal inti yang dalam bentuk asset saja tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah modal SDM, teknologi dan keterampilan pengelolaan.

4.3.4.4. Peluang/Potensi Pasar PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera

Potensi pasar pelayanan PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera dapat dilihat dari porsi jumlah penduduk Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 132.324 jiwa dengan jumlah

penduduk dominan berada di Kecamatan Halong (15,56%) dan Kecamatan Paringin (14,67%). Jumlah penduduk di Kecamatan Halong terbesar di Kabupaten Balangan yaitu 20.584 jiwa (15,56%), dan jumlah penduduk terkecil pada Kecamatan Tebing Tinggi yang memiliki jumlah penduduk paling yaitu 7.264 jiwa (5,49%). Hal ini memberikan gambaran bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Balangan belum merata. Jumlah penduduk yang belum merata ini bisa diantisipasi oleh PT. BPR dengan menambah jaringan untuk menjangkau kecamatan-kecamatan yang memiliki penduduk terkecil agar keterjangkauan masyarakat Kabuapten Balangan terlayani secara optimal.



Gambar 5. Grafik jumlah penduduk dan persentase Kabupaten Balangan pada setiap Kecamatan

Penduduk menurut Kelompok umur di Kabupaten Balangan didominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun (69,39%), usia tidak produktif 0-14 tahun (27,95%), dan usia ≥ 65 tahun (3,21%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dari aspek umur penduduk di Kabupaten Balangan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan berbagai usaha khususnya ketersediaan SDM lapangan kerja dengan dukungan bonus demografi dari aspek penduduk usia produktif.

Kegiatan usaha masyarakat Kabupaten Balangan pada UMKM sampai dengan tahun 2020 menunjukkan dominasi pada jenis usaha mikro berjumlah 11.565 (98,92%) dan terdistribusi di seluruh wilayah kecamatan. Usaha mikro merupakan bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh suatu badan usaha ataupun individu yang mampu memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2018 dengan aset maksimal yang dapat masuk dalam kategori ini adalah Rp 50 juta, sedangkan omset maksimalnya adalah Rp 300 juta. Usaha kecil di Kabupaten Balangan berjumlah 116 usaha (0,99%) yang terdistribusi diseluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Lampihong. Usaha kecil adalah bentuk usaha produktif yang bergerak sendiri dan dilakukan oleh badan usaha ataupun individu yang bukan berasal dari cabang perusahaan yang telah dimiliki. Dalam aturan perundang-undangan, aset maksimal yang terdapat dalam kategori ini adalah sekitar Rp 50 juta – Rp 500 juta, sedangkan omsetnya adalah sekitar Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah yang terdapat di Kabupaten Balangan berjumlah 10 usaha (0,09%) terdapat pada 2 (dua) wilayah yaitu Kecamatan Paringin dan Tebing Tinggi. Usaha menengah bisa diartikan sebagai usaha produktif yang bergerak sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan dari anak ataupun cabang usaha yang dimiliki, atau bukan menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung. Jumlah kekayaan bersih atau aset maskimal yang masuk dalam kategori ini adalah Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan omset sekitar Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Balangan, selama tahun 2016-2020 disajikan berikut ini.

Tabel 17. Jumlah UMKM di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Skala Usaha		
	Mikro	Kecil	Menengah
2016	335	250	10
2017	39	219	28
2018	4.248	298	35
2019	4.838	255	31
2020	11.569	116	10

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel

Berdasarkan pada Tabel 17 diatas, pada tahun 2020 distribusi UMKM di Kabupaten Balangan masih ada skala kecil dan menengah. Pada tahun 2021

dan 2022 mengalami penurunan dan yang ada hanya usaha skala mikro sebanyak 8.209 dan meningkat menjadi 11.030 pada tahun 2022 sebagaimana disajikan secara lengkap pada Tabel 18 berikut ini

Tabel 18. Distribusi dan Klasifikasi UMKM di Kabupaten Balangan Tahun 2020

No	Kecamatan	Klasifikasi Usaha					
		2020*				2021**	2022**
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah	Mikro	
1	Paringin	858	29	1	888	845	1.704
2	Paringin Selatan	1.219	5	0	1.224	936	1.288
3	Batumandi	2.196	2	0	2.198	1301	1.392
4	Lampihong	2.001	0	0	2.001	1448	1.632
5	Awayan	2.131	27	0	2.158	1129	1.645
6	Tebing Tinggi	596	13	9	618	446	573
7	Juai	1.647	21	0	1.668	1077	1519
8	Halong	921	19	0	940	1027	1.277
JUMLAH		11.569	116	10	11.695	8.209	11.030

Sumber: * Laporan Kajian Kebutuhan Daerah Kabupaten Balangan 2021 & BAPPEDA

** Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Jenis usaha UMKM di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 yang mayoritas adalah perdagangan eceran (3.341), makanan/minuman (2.920), dan Jasa (1.341), dan selainnya pada berbagai jenis usaha, selengkapnya tersaji dalam Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Jenis UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan 2022

No.	Nama	Jumlah	
		2021*	2022**
1	Makanan dan Minuman	2.292	2.920
2	Pertanian	577	263
3	Peternakan	268	267
4	Perkebunan	100	488
5	Kehutanan	-	79
6	Perikanan	-	78
7	Konstruksi	22	229
8	Reparasi /Sepeda Motor	178	-
9	Otomotif dan Reparasi	-	436
10	Perdagangan Eceran	2.852	3.341
11	Industri Olahan	376	546
12	Fashion		897
13	Pendidikan		9

14	Teknik Komputer dan Internet		96
15	Jasa Lainnya	1.544	1.341
	Jumlah	8.209	11.030

Sumber: * Laporan Kajian Kebutuhan Daerah Kabupaten Balangan 2021 (data diolah 2022)
 ** Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Keberadaan UMKM sangat berperan penting karena erat berkaitan dengan kehidupan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan perkembangan ekonomi daerah. Dalam perekonomian UMKM tergolong sektor riil yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis. UMKM dapat membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun penopang ekonomi daerah karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini selaras dengan pendapat ahli ekonomi Amerika Joseph Alois Schumpeter, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan UMKM ada di dalamnya. Namun demikian, meskipun UMKM memiliki peran penting dan memberikan kontribusi dalam perekonomian suatu Daerah, bisnis UMKM masih memiliki kelemahan dalam operasinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan dukungan dan dorongan agar bisnis UMKM berjalan dengan lancar. Selain itu, bisnis UMKM menghadapi permasalahan klasik yaitu keterbatasan inovasi dan teknologi, dan yang dominan adalah keterbatasan akses pada pembiayaan dan permodalan. Menghadapi kondisi ini peran BPR di suatu daerah sangat vital dalam hal untuk menjemput bola dalam penyaluran kredit pada UMKM.

4.3.5. Aspek Sosial dan Ekonomi

Nainggolan (2020) menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Perekonomian nasional sendiri, baru mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3%.

Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, dan penurunan realisasi belanja pemerintah termasuk belanja barang. Disamping itu, terjadi penurunan perdagangan luar negeri yang cukup tajam. Palung penurunan

pertumbuhan ekonomi telah dilalui pada triwulan II, namun Covid-19 masih akan menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional pada triwulan III dan diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan efektif mulai triwulan III. PEN tersebut terdiri dari 3 (tiga) kebijakan utama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri (*demand*), peningkatan aktivitas dunia usaha (*supply*) serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Ketiga kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat.

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

Menurut data Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebanyak 11.030. Jumlah ini seluruhnya masuk kategori mikro. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena UMKM yang sangat banyak dan dapat menjadi daya serap tenaga kerja yang besar. Potensi mikro ini yang perlu dikembangkan untuk meningkat menjadi kecil atau menengah sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kalau setiap UMKM dapat menyerap tenaga kerja minimal tiga orang, maka UMKM dapat menyediakan lapangan kerja sebanyak 35.085 orang. Adapun Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Balangan terus menerus mengalami peningkatan meskipun sempat berkurang di tahun 2020 dan puncaknya terjadi di tahun 2021 yang mencapai 8.062 jiwa. Kondisi ini dapat dijumpatani untuk diminimalisir dengan membina dan mengembangkan UMKM. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan memberikan kemampuan permodalan yang memadai.

4.4. Analisis Keuangan

Analisis keuangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan investasi atau dalam hal ini jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,-
Penyertaan ini direncanakan dilakukan dengan asumsi dua tahap pencairan, yaitu sebanyak Rp.5.000.000.000,- pada akhir tahun 2022 dan sisanya Rp. 5.000.000.000,- pada petengahan tahun 2023.
2. Menyusun skema pemberian kredit (baik jumlah, maupun waktu pencairan).
Pemberian kredit kepada nasabah direncanakan dilakukan pada awal tahun 2023 sampai tahun 2026. Sisa yang belum diberikan dalam bentuk kredit setiap tahun, akan dimanfaatkan untuk deposito dan penempatan lain. Rencana penerimaan penyertaan Pemda Kabupaten Balangan dan penyaluran kepada nasabah UMKM dan lainnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 20. Rencana Penyaluran Kredit dan Penempatan Lainnya

Tahun	Penerimaan Penyertaan Pemda	Kredit UMKM Tidak Berbunga	Kredit Berbunga	Saldo	
				Deposito Awal Tahun	Tabungan di bank lain
2022	5.000.000.000	-	-	-	
2023	5.000.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000	5.972.733.333
2024	-	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	3.972.733.333
2025	-	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	2.435.881.320
2026	-	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	688.704.253
2027	-	-	-	3.000.000.000	4.078.877.365
2028	-	-	-	3.000.000.000	6.737.253.919
2029*	-	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	2.737.253.919
Jumlah	10.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		

* Kredit pada tahun 2029 bersumber dari hasil pengembalian dan keuntungan

3. Menentukan proyeksi *cash flow* dan laba bersih selama enam tahun (tahun 2023 sampai 2028).

Proyeksi ini didasarkan pada pemanfaatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balanagan sebanyak Rp 10.000.000.000,-.

4. Mengidentifikasi penghasilan dan beban atas adanya tambahan penyertaan modal. Perhitungan prediksi penghasilan dan beban, tentu berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan, yaitu:
 - a. Jumlah kredit sesuai rencana pada poin 1 dan 2 (**Tabel 20**)
 - b. Tingkat bunga kredit 2% per bulan.
 - c. Bunga deposito 6% per tahun.
 - d. Beban operasional 0,5% dari total kredit
 - e. Penyisihan piutang tak tertagih 0,5% dari total kredit
 - f. Bunga tabungan sebesar 2 % per tahun.

Proyeksi Laba bersih dan Arus Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Proyeksi Laba Rugi dan Arus Kas atas Penyertaan Rp10.000.000.000

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Laba (Rugi)	246.915.333	347.188.000	441.570.067	516.570.067	466.768.135	404.570.164
Net cash flow	438.532.267	1.259.750.400	2.325.136.946	3.519.526.738	2.721.290.587	1.684.897.712

5. Menghitung kelayakan investasi berdasarkan NPV, Net B/C Ratio, IRR, dan DPP.

- a. *Net Present Value* (NPV)

Net Present Value (NPV) Karet diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NPV = -A_0 + \sum_{t=1}^n \frac{A_t}{(1+r)^t}$$

Hasil perhitungan *net present value* disajikan pada tabel berikut ini:

\

Tabel 22. Net Present Value (NPV)

1	438.532.267		0,9524	417.658.131
2	1.259.750.400		0,907	1.142.593.613
3	2.325.136.946		0,8638	2.008.453.294
4	3.519.526.738		0,8227	2.895.514.648
5	2.721.290.587		0,7835	2.132.131.175
6	1.684.897.712		0,7462	1.257.270.673
	PV Proceed			9.853.621.533
	Outlay Tahun Ke-0	1.000.000.000	1	1.000.000.000
	Outlay Tahun Ke-1	2.000.000.000	0,9524	1.904.800.000
	Outlay Tahun Ke-2	3.000.000.000	0,907	2.721.000.000
	Outlay Tahun Ke-3	4.000.000.000	0,8638	3.455.200.000
	PV Outlay	10.000.000.000		9.081.000.000
	NPV			772.621.533

Perhitungan *Net Present Value* (NPV) diperoleh hasil seperti tabel 22. Hal ini berarti menghasilkan nilai positif (+). Artinya arus kas masuk lebih besar daripada investasi awalnya.

b. *Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)*

Net Benefit Cost Ratio (BCR) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BCR = \frac{(PV)B}{Cf}$$

Net Benefit Cost Ratio (BCR) diperoleh pada tabel berikut:

Tabel 23. *Net Benefit Cost Ratio* (BCR)

Tahun	Outlay Pertahun	DF 5%	PV
0	1.000.000.000	1,0000	1.000.000.000
1	2.000.000.000	0,9524	1.904.800.000
2	3.000.000.000	0,9070	2.721.000.000
3	4.000.000.000	0,8638	3.455.200.000
Total PV Outlay			(9.081.000.000)
Total PV Proceed			9.853.621.533
Benefit Cost Ratio			1,09

Hasil *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/CR) menunjukkan angka 1,09. Hal ini berarti bahwa investasi layak untuk dilakukan karena *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/CR) lebih besar dari 1 (>1).

c. *Internal Rate Return (IRR)*

Internal Rate of Return (IRR)) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)}(i_2 - i_1)$$

Internal Rate of Return (IRR) diperoleh pada tabel berikut:

Tabel 24. *Internal Rate of Return (IRR)*

	Proceed	Outlay	DF 5%	PV
1	438.532.267		0,9524	417.658.131
2	1.259.750.400		0,907	1.142.593.613
3	2.325.136.946		0,8638	2.008.453.294
4	3.519.526.738		0,8227	2.895.514.648
5	2.721.290.587		0,7835	2.132.131.175
6	1.684.897.712		0,7462	1.257.270.673
				9.853.621.533
	Outlay Tahun Ke-0	1.000.000.000	1	1.000.000.000
	Outlay Tahun Ke-1	2.000.000.000	0,9524	1.904.800.000
	Outlay Tahun Ke-2	3.000.000.000	0,907	2.721.000.000
	Outlay Tahun Ke-3	4.000.000.000	0,8638	3.455.200.000
		10.000.000.000		9.081.000.000
	NPV1			772.621.533
DF 6%				
1	438.532.267		0,9434	413.711.340
2	1.259.750.400		0,89	1.121.177.856
3	2.325.136.946		0,8396	1.952.184.980
4	3.519.526.738		0,7921	2.787.817.129
5	2.721.290.587		0,7473	2.033.620.456
6	1.684.897.712		0,705	1.187.852.887
				8.308.511.762
	Outlay Tahun Ke-0	1.000.000.000	1	1.000.000.000
	Outlay Tahun Ke-1	2.000.000.000	0,9434	1.886.800.000
	Outlay Tahun Ke-2	3.000.000.000	0,89	2.670.000.000
	Outlay Tahun Ke-3	4.000.000.000	0,8396	3.358.400.000
		10.000.000.000		8.915.200.000
	NPV2			-606.688.238

Hasil IRR menunjukkan angka 5,93% yang berarti lebih besar dari biaya modal sebesar 5%. Hal ini berarti investasi layak untuk dilakukan.

d. *Discounted Payback Period (DPP)*

Discounted Payback Period menunjukkan hasil pada tabel berikut:

Tabel 25. *Discounted Payback Period*

Tahun	Arus Kas	DF 5%	PV Arus Kas	Kumulatif
0	-1.000.000.000	1	(1.000.000.000)	- 1.000.000.000
1	438.532.267	0,9524	417.658.131	- 582.341.869
	-2.000.000.000	0,9524	(1.904.800.000)	- 2.487.141.869
2	1.259.750.400	0,907	1.142.593.613	- 1.344.548.256
	-3.000.000.000	0,907	(2.721.000.000)	- 4.065.548.256
3	2.325.136.946	0,8638	2.008.453.294	- 2.057.094.962
	-4.000.000.000	0,8638	(3.455.200.000)	- 5.512.294.962
4	3.519.526.738	0,8227	2.895.514.648	- 2.616.780.314
5	2.721.290.587	0,7835	2.132.131.175	- 484.649.140
6	1.684.897.712	0,7462	1.257.270.673	772.621.533

Discounted Payback Period = 5 tahun, 3 bulan

Hasil perhitungan *Discounted Payback Period (DPP)* menunjukkan angka 5 tahun, 3 bulan. Hal ini berarti bahwa investasi akan ditutupi selama 5 tahun, 3 bulan. Pengambilan keputusan tentang layak tidaknya usaha tersebut dilihat dari *Discounted Payback Period (DPP)* tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan untuk menentukan berapa lama tingkat pengembalian yang diharapkan.

e. Analisis Rasio Keuangan

Tabel 26. Analisis Rasio Keuangan

Tahun	CAR	ROA	NPL	LDR	BOPO	KAP	CR	PPAP
2017	152,26	6,89	2,16	75,95	63,28	1,57	50,55	100,00
2018	146,86	6,84	2,38	76,46	63,36	2,08	104,29	100,00
2019	158,94	5,82	5,17	71,44	68,00	4,73	66,27	100,00
2020	149,37	5,48	6,45	71,92	68,62	6,11	57,64	100,00
2021	123,46	5,20	10,50	85,91	72,56	9,90	22,97	100,00

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), angka CAR pada tabel diatas menunjukkan di atas 8% sehingga dikategorikan baik. Nilai ROA yang sehat apabila diatas 2%, berdasarkan tabel maka dapat di simpulkan bahwa ROA sangat sehat. Adapun besaran yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia mengenai ratio Non Performing Loan adalah maksimal 5 % jika melebihi 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, dilihat dari tabel tahun 2019 hingga 2021 nilai NPL melebihi 5% sehingga hal ini perlu diperbaiki.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya Loan to Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110 % berdasarkan tabel nilai LDR dikatakan sangat baik yaitu dibawah 110%. Perbankan dikategorikan sehat, apabila nilai BOPO maksimal 94-96%, berdasarkan tabel keseluruhan nilai dibawah 94% sehingga dikategorikan cukup sehat. Rasio KAP dikatakan sehat karena berada pada angka $0,00\% \leq 10,35\%$, data pada tabel menunjukan angka pada rentang tersebut sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio CR dikategorikan sehat karena diatas 4,05%. Rasio PPAP yang dikategorikan sehat adlaah memenuhi kriteria $\geq 80\%$ nilai PPAP menunjukan konsisten 100% yang sehat.

6. Menyimpulkan hasil analisis keuangan

Hasil analisis keuangan menunjukkan layak tidaknya suatu keputusan investasi. Hasil ini dikombinasikan dengan interpretasi aspek non keuangan, yaitu SWOT, aspek hukum dan kelembagaan, aspek penyertaan modal, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial dan ekonomi. Adapun kesimpulan aspek keuangan disajikan dalam Tabel 27 sebagai berikut:

Tabel 27. Kesimpulan Kelayakan Investasi Aspek Keuangan

No	Teknik Analisis	Hasil Perhitungan	Simpulan
1	<i>Net Present Value (NPV)</i>	Rp. 772.621.533,-	Layak
2	<i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)</i>	1,09	Layak
3	<i>Internal Rate Return (IRR)</i>	5,93%	Layak
4	<i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	5 Tahun, 3 Bulan	Layak

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera berada pada posisi dengan tingkat persaingan tinggi sebagai ancaman, namun memiliki kekuatan dari segi internal dan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka Panjang dengan cara strategi diversifikasi.
2. Potensi UMKM di Kabupaten Balangan paling banyak bergerak di bidang kuliner yang memberikan dampak dalam menghidupkan sektor lainnya seperti peternakan, perikanan, pertanian, dan jasa transportasi.
3. Kinerja keuangan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera secara keseluruhan cukup baik terlihat dari rasio keuangan yang disajikan di aspek keuangan Tabel 26.
4. Berdasarkan analisis kelayakan investasi dari aspek keuangan menunjukkan bahwa penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebanyak Rp10.000.000.000,- pada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera layak untuk dilakukan.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Pelaksanaan rencana jangka pendek lebih difokuskan pada mengidentifikasi UMKM yangf potensial untuk dibina dan diberikan kredit. Oleh karena itu sinergi antara PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dengan instansi terkait menjadi sangat penting untuk keberlanjutan pengembangan UMKM.
2. PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam jangka pendek lebih memprioritaskan pemberian kredit pada UMKM bidang usaha kuliner.
3. Non Performing Loan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera yang mencapai 13,82% pada tahun 2021 melebihi standar 5%. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari analis kredit sehingga ke depan dapat diminimalisir kredit yang bermasalah.
4. Mengidentifikasi calon nasabah dari UMKM untuk mendapatkan pinjaman dengan kriteria yang jelas dan mempertimbangkan unsur pemerataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyana, R., Amalia, R., Salsabilah, D. S., Uka, A. S., Rilisa, C., & Gunawan, W. (2020). Strategy for increasing lowland rice productivity in West Java Province with the SWOT-AHP Model Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 457(1), 012058. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/457/1/012058>
- Cresswell, J. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, second ed., John W. Cresswell. In *Australasian Emergency Nursing Journal* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2008.02.005>
- Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 363–382. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V5I2.3019>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja GrafindoPersada.
- Kasmir, & Jakfar. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis*. Prenadamedia Group.
- Malihah, L., Yulian Ma, M., Adi Riswan Al Mubarak, M., Amalia Institut Agama Islam Darussalam, R., & Selatan, K. (2021). Analisis SWOT Terhadap Motivasi Penggunaan Transaksi Non Tunai (E-Money Syariah) oleh Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Sekitar Lingkungan Kampus IAI Darussalam Martapura). In *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* (Vol. 1, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=UHV8Z2SE57EC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Riyadi, & Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Multigrafika.
- Rustiadi, E. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara.

- Sucipto, A. (2011). *Study Kelayakan Bisnis*. UIN Maliki Press.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=622807>
- Yin, R. K. (2003). Case Study Research . Design and Methods. In *SAGE Publications* (Vol. 26, Issue 1, pp. 93–96).
<https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822dda9e>
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Quilford Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penunjukan Tim Kajian

Lampiran 2: Proyeksi Arus Kas dan Penyaluran Periode Tahun 2022 sampai 2029

Proyeksi Arus Kas dan Penyaluran Periode Tahun 2022 sampai 2029							
Tahun	Uraian		Penyaluran Kredit		Saldo Penempatan		Saldo Kas di Tangan
			UMKM 0%	Berbunga	Deposito	Tabungan	
2022	Menerima penyertaan Pemda akhir bulan Desember	5.000.000.000					5.000.000.000
2023	Penempatan deposito dari Januari sampai akhir tahun	1.500.000.000			1.500.000.000		3.500.000.000
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	85.649.733					3.414.350.267
	Penempatan pada tabungan di bank lain pada awal Januari	2.472.733.333				2.472.733.333	941.616.934
	Menyalurkan kredit pada awal bulan April	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000			(58.383.066)
	Menerima penyertaan Pemda pada bulan Juni	5.000.000.000					4.941.616.934
	Penempatan deposito 6 bulan (Juli sampai Desember)	1.500.000.000			3.000.000.000		3.441.616.934
	Penempatan pada tabungan di bank lain pada awal Juli	3.500.000.000				5.972.733.333	(58.383.066)
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	280.000.000					221.616.934
	Bunga tabungan	109.182.000					330.798.934
	Penerimaan bunga deposito akhir tahun	135.000.000					465.798.934
	Pajak penghasilan badan (20%)	49.383.067					416.415.867
2024	Menarik tabungan untuk penyaluran kredit	2.000.000.000			3.000.000.000	3.972.733.333	2.416.415.867
	Menyalurkan kredit pada awal bulan Januari	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			416.415.867
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	119.704.267					296.711.600
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	1.120.000.000					1.416.711.600
	Penerimaan bunga deposito akhir Desember	180.000.000					1.596.711.600
	Bunga tabungan	79.454.667					1.676.166.267
		Pajak penghasilan badan (20%)	69.437.600				
2025	Menarik tabungan untuk penyaluran kredit	1.536.852.013				2.435.881.320	3.143.580.680
	Menyalurkan kredit pada awal bulan Januari	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000		143.580.680
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	143.580.680					-
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	2.240.000.000					2.240.000.000
	Penerimaan bunga deposito akhir Desember	180.000.000					2.420.000.000
	Bunga tabungan	48.717.626					2.468.717.626
	Pajak penghasilan badan (20%)	88.314.013					2.380.403.613
2026	Menarik tabungan untuk penyaluran kredit	1.747.177.067			3.000.000.000	688.704.253	4.127.580.680
	Menyalurkan kredit pada awal bulan Januari	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000			127.580.680
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	127.580.680					-
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	3.453.333.333					3.453.333.333
	Penerimaan bunga deposito akhir Desember	180.000.000					3.633.333.333
	Bunga tabungan	13.774.085					3.647.107.418
	Pajak penghasilan badan (20%)	103.314.013					3.543.793.405
2027	Saldo deposito sampai awal tahun 2027				3.000.000.000		3.543.793.405
	Penempatan pada tabungan di bank lain pada awal Januari	3.390.173.111				4.078.877.365	153.620.294
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	153.620.294					-
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	2.613.333.333					2.613.333.333
	Penerimaan bunga deposito akhir Desember	180.000.000					2.793.333.333
	Bunga tabungan	81.577.547					2.874.910.881
	Pajak penghasilan badan (20%)	93.353.627					2.781.557.254
2028	Penempatan pada tabungan di bank lain pada awal Januari	2.658.376.554			3.000.000.000	6.737.253.919	123.180.699
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	123.180.699					(0)
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	1.493.333.333					1.493.333.333
	Penerimaan bunga deposito akhir Desember	180.000.000					1.673.333.333
	Bunga tabungan	134.745.078					1.808.078.412
	Pajak penghasilan badan (20%)	80.914.033					1.727.164.379
2029	Menarik tabungan untuk penyaluran kredit	4.000.000.000				2.737.253.919	5.727.164.379
	Menyalurkan kredit pada awal bulan Januari	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000		1.727.164.379
	Biaya operasional, kerugian piutang, dan tenaga kerja	104.514.033					1.831.678.412
	Penerimaan pokok pinjaman dan bunga sampai akhir Desember	1.493.333.333					3.325.011.745
	Penerimaan bunga deposito akhir Desember	180.000.000					3.505.011.745
	Bunga tabungan	54.745.078					3.559.756.823
	Pajak penghasilan badan (20%)	65.580.699					3.494.176.124

Lampiran 3: Angsuran Pokok dan Bunga Kredit

Perhitungan Angsuran Pokok Pinjaman dan Bunga per bulan sesuai tingkat bunga untuk kredit modal usaha (Kredit Berbunga)												
Tahun	Kredit Berbunga	36 bulan			Penerimaan Angsuran Pokok Kredit dan Bunga							Total
		Pokok/bln	Bunga/bln	Total/bln	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2023	500.000.000	13.888.889	3.333.333	17.222.222	155.000.000	206.666.667	206.666.667	51.666.667				620.000.000
2024	1.000.000.000	27.777.778	6.666.667	34.444.444		413.333.333	413.333.333	413.333.333				1.240.000.000
2025	1.500.000.000	41.666.667	10.000.000	51.666.667			620.000.000		620.000.000			1.860.000.000
2026	2.000.000.000	55.555.556	13.333.333	68.888.889				826.666.667	826.666.667	826.666.667		2.480.000.000
2029	2.000.000.000	55.555.556	13.333.333	68.888.889							826.666.667	826.666.667
Total pokok dan bunga					155.000.000	620.000.000	1.240.000.000	1.911.666.667	1.446.666.667	826.666.667	826.666.667	7.026.666.667
Penerimaan Pokok kredit berbunga					125.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.541.666.667	1.166.666.667	666.666.667	666.666.667	5.666.666.667
Bunga kredit					30.000.000	120.000.000	240.000.000	370.000.000	280.000.000	160.000.000	160.000.000	1.360.000.000
Penerimaan pokok kredit tanpa bunga					125.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.541.666.667	1.166.666.667	666.666.667	666.666.667	5.666.666.667
Bunga Tabungan (2% per tahun)					109.182.000	79.454.667	48.717.626	13.774.085	81.577.547	134.745.078	54.745.078	522.196.082
Bunga Deposito					135.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	1.215.000.000
Jumlah kredit berbunga					500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000				7.000.000.000
Jumlah kredit tanpa bunga					500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000				7.000.000.000

Lampiran 4: Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi Laba Rugi atas Penyertaan Modal Rp 10.000.000.000							
Tahun 2023 sampai 2029							
URAIAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Penghasilan:							
- Bunga kredit	30.000.000	120.000.000	240.000.000	370.000.000	280.000.000	160.000.000	160.000.000
- Bunga deposito	135.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
- Bunga tabungan	109.182.000	79.454.667	48.717.626	13.774.085	81.577.547	134.745.078	54.745.078
Total Penghasilan	274.182.000	379.454.667	478.836.733	558.836.733	509.034.801	446.836.831	366.836.831
Beban-beban:							
- Biaya operasional	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
- Kerugian piutang tidak tertagih	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	13.333.333
- Biaya tenaga kerja	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Total Beban	27.266.667	32.266.667	37.266.667	42.266.667	42.266.667	42.266.667	38.933.333
Labanya (Rugi)	246.915.333	347.188.000	441.570.067	516.570.067	466.768.135	404.570.164	327.903.497
Pajak penghasilan (20%)	49.383.067	69.437.600	88.314.013	103.314.013	93.353.627	80.914.033	65.580.699
Labanya setelah pajak	197.532.267	277.750.400	353.256.053	413.256.053	373.414.508	323.656.131	262.322.798

Lampiran 5: Proyeksi Arus Kas

ALIRAN KAS ATAS PENYERTAAN MODAL 10.000.000.000								
Cash in:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Penerimaan pokok kredit (Jangka waktu kredit 3 tahun)	250.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	3.083.333.333	2.333.333.333	1.333.333.333	1.333.333.333	11.333.333.333
Pendapatan bunga kredit	30.000.000	120.000.000	240.000.000	370.000.000	280.000.000	160.000.000	160.000.000	1.360.000.000
Bunga Deposito (6% per 6 bulan)	135.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	1.215.000.000
Bunga tabungan 2% per tahun	109.182.000	79.454.667	48.717.626	13.774.085	81.577.547	134.745.078	54.745.078	522.196.082
Total kas masuk	524.182.000	1.379.454.667	2.468.717.626	3.647.107.418	2.874.910.881	1.808.078.412	1.728.078.412	14.430.529.415
Cash out:								-
Pemberian kredit (dilakukan pada akhir bulan Maret 2023, selanjutnya setiap awal tahun selama tahun 2024 sampai 2026)	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	-	0	4.000.000.000	14.000.000.000
Biaya operasional (0,5% dari total kredit)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.000.000
Kerugian piutang tidak tertagih (1% dari rata-rata kredit setiap tahun)	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	13.333.333	113.333.333
Biaya tenaga kerja (2 orang @ Rp2.800.000)	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	39.200.000
Pajak penghasilan badan (20%)	58.383.067	87.437.600	106.314.013	127.580.680	111.353.627	80.914.033	65.580.699	595.297.053
Total Pengeluaran	85.649.733	119.704.267	143.580.680	127.580.680	153.620.294	123.180.699	104.514.033	857.830.386
Net cash flow tambahan	438.532.267	1.259.750.400	2.325.136.946	3.519.526.738	2.721.290.587	1.684.897.712	1.623.564.379	13.572.699.030